

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA , TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DAN PDRB TERHADAP JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-
2021 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

KIKI DWI RAHMAWATI

1905026040

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp./Fax. : (024) 7601291
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Kiki Dwi Rahmawati
NIM : 1905026040
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal : 29 Mei 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 06 Juni 2023

Ketua Sidang,

Dr. H. Maltuf Fitri, S.E., M.Si
NIP. 197410162003121003

Penguji Utama I,

Nurudin, S. E., M.M
NIP. 199005232015031004

Pembimbing I,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 197108301998031003

Sekretaris Sidang,

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 198607312019031008

Penguji Utama II,

Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.
NIP. 195902151985031005

Pembimbing II,

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 198607312019031008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Kiki Dwi Rahmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Kiki Dwi Rahmawati
NIM : 1905026040
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 Dalam Persepektif Ekonomi Islam”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag

NIP. 197108301998031004

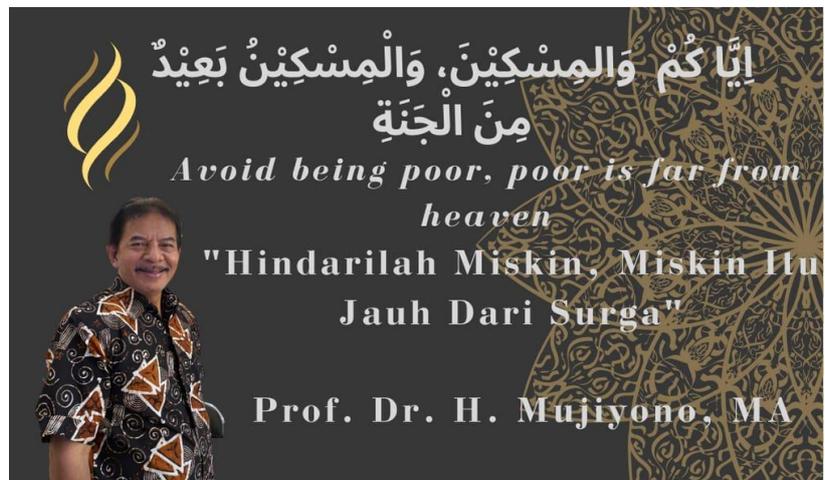
Semarang, 01 Maret 2023

Pembimbing II

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si

NIP.198607312019031008

MOTTO



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala kenikmatan dan ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan sebarang karya kecil ini, dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibu saya yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang terbesar, tetesan keringat dan tenaga pikiran yang tiada henti kalian berikan kepadaku, dalam setiap perjalanan hidup, Terima Kasih atas semua yang telah diberikan secara ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan balasan sedikitpun.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Dwi Rahmawati

NIM: 1905026040

Jurusan: Ekonomi Islam

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada refrensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 1 Maret 2023

Deklator.

Kiki Dwi Rahmawati

NIM. 1905026040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S{	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'A	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G{	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Ham zah	A	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnyaberupa tanda atau harakat.

Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat danhuruf.

Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupaharakat dan huruf.

Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ & يِ	Fathah dan Alif atau Ya	A<	A dan garis di atas
إِ & يِ	Kasrah dan Ya	I<	I dan garis di atas

° & و	Dhammah dan Wau	U<	U dan garis di atas
-------	--------------------	----	---------------------------

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Islam sendiri memandang kemiskinan sebagai musibah yang dapat membahayakan akhlak, iman, dan nalar seseorang. Pemerintah Jawa Tengah telah mengupayakan program-program untuk mengurangi kemiskinan namun belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM, TPT dan PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2019-2021.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan literatur berupa buku, catatan dan laporan hasil penelitian sebelumnya tentang kemiskinan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel atau gabungan data silang dan data time series jumlah penduduk miskin, IPM, TPT dan PDRB pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan teknis analisis berupa analisis data panel dengan metode OLS dan bantuan program aplikasi Eviews10.

Berdasarkan hasil analisis data peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah karena wabah Covid-19 meningkatkan komponen indeks angka harapan hidup dan pendidikan namun tidak diikuti dengan peningkatan indeks taraf hidup layak. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin karena kebijakan PSBB membuat banyak industri mengurangi jam kerja dan tenaga kerja. PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena masih ada beberapa sektor yang tidak terkena dampak Covid misalnya sektor pertanian, kehutanan dan lainnya. pemerintah memberikan prioritas kepada kabupaten dan kota yang memiliki kawasan industri utama guna mengurangi pengangguran di Pusat Jawa dengan membuka investasi asing. pengelolaan sektor PDRB yang terkena dampak dan memiliki kontribusi besar diprioritaskan. Serta masyarakat harus berusaha mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, IPM, Pengangguran, PDRB

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional problem. Islam itself views poverty as a calamity that can endanger one's morals, faith, and reason. The Central Java government has pursued programs to reduce poverty but have not been optimal. This study aims to determine the effect of HDI, TPT and GRDP on the number of poor people in Central Java in 2019-2021.

This research is a literature research, which is research that uses literature in the form of books, notes and reports on the results of previous research on poverty. The source of data in this study is secondary data in the form of panel data or a combination of cross data and time series data on the number of poor people, HDI, TPT and GRDP in 35 districts / cities in Central Java Province. This research uses technical analysis in the form of panel data analysis with the OLS method and the help of the Eviews10 application program.

Based on the results of data analysis, researchers can conclude that the human development index has a significant positive effect on the number of poor people in Central Java province because the Covid-19 outbreak increases the components of the life expectancy and education index, but is not followed by an increase in the decent living standard index. The open unemployment rate has a positive and significant effect on the number of poor people because the PSBB policy has made many industries reduce working hours and labor. GRDP has a negative and insignificant effect because there are still several sectors that are not affected by Covid, for example the agriculture, forestry and other sectors. The government gives priority to districts and cities that have major industrial estates to reduce unemployment in central Java by opening up foreign investment. management of the affected GRDP sector and has a large contribution is prioritized. And the community must try to support government policies in the context of poverty alleviation.

Keywords : Poverty, HDI, Unemployment, GRDP

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya penulis masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (s1) dalam bidang ilmu ekonomi islam.

Tentu menjadi hal yang mustahil apabila skripsi ini dapat selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Beserta Jajarannya
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Nurudin, S.E.,MM selaku sekertaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Dr. Ali Murtadho, M.Ag dan Bapak Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar
5. Bapak Zuhdan Ady Fataron, M.Si selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

6. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
7. Bapak dan Ibu penulis yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, dan inspirasi kepada penulis dengan harapan agar penulis kelak menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan sesama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu segala masukan yang konstruktif maupun koreksi sangat penulis harapkan demi pengembangan skripsi ini. Semoga skripsi ini memacu kami selaku penulis untuk terus mengeksplorasi dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya jika ditemukan kebenaran dalam skripsi ini semuanya ilmu itu adalah dari Allah, namun jika masih terdapat banyak kekurangan adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyusun. Demikian yang dapat penulis sampaikan akhirul kalam.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 1 Maret 2023

Kiki Dwi Rahmawati

1905026040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN ABSTRACT	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xviii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Kemiskinan.....	14
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	16
2.1.3 Pengangguran.....	19
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran	23
2.4 Hipotesis	24
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	2
3.1 Pendekatan Penelitian.....	25
3.2 Sumber Data	25

3.3 Metode Pengumpulan Data	26
3.4 Populasi dan Teknik Sampling	26
3.5 Teknis Analisis Data.....	30
1 Analisis Data Panel.....	31
2 Uji Asumsi Klasik	31
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	33
4.1.2 Kemiskinan.....	34
4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia	35
4.1.4 Pengangguran.....	36
4.1.5 Produk Domestik Regional Bruto	37
4.2 Analisis Data	38
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik	38
4.2.2 Analisis Data Fixed Effect Model.....	39
4.3 Pengujian Statistik Analisis Regresi	40
4.3.1 Uji Parsial (Uji t).....	40
4.3.2 Uji Simultan (Uji F)	41
4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	42
4.3.4 Persamaan Regresi Linier Berganda	43
4.4 Pembahasan	43
4.4.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	44
4.4.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	46
4.4.3 Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	48
4.4.4 Kemiskinan Dalam Persepektif Islam	51
BAB V. PENUTUP.....	53
A Kesimpulan	53

B	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN.....		58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		65

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Variabel IPM, TPT, PDRB Dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	2
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	20
4.1 Tabel Output Eviews Statistik Deskriptif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	35
4.2 Tabel Output Eviews Statistik Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	36
4.3 Tabel Output Eviews Statistik Deskriptif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	36
4.4 Tabel Output Eviews Statistik Deskriptif Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	37
4.5 Hasil Regresi Utama IPM, TPT, Dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 Dengan Model FEM	38
4.6 Hasil Regresi Logaritma Natural IPM, TPT, Dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 Dengan Model FEM	38
4.7 Tabel Uji Normalitas	39
4.8 Tabel Uji Multikolinearitas	40
4.9 Tabel Uji Heterokedastisitas	40
4.10 Tabel Uji Autokorelasi	41
4.11 Tabel Uji T Statistik Dan Koefisien	43
4.12 Tabel PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022 berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha	50

DAFTAR GAMBAR

2.1 Diagram Lingkaran Setan Kemiskinan Nurkse.....	10
2.2 Kerangka Berpikir	22

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang saling berkaitan dan multidimensi dari berbagai faktor diantaranya tingkat pendapatan masyarakat, pendidikan, indeks pembangunan manusia, pengangguran, kesehatan, letak geografis dan lokasi lingkungan. Menanggapi kemungkinan PHK, serta sikap dan ketidakadilan ribuan pekerja telah menunjukkan bahwa masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap makanan dan air, tempat tinggal yang tidak memadai, atau bahkan terpaksa keluar dari rumah mereka. Khususnya di kota-kota besar Indonesia, perlakuan terhadap buruh migran perempuan merupakan indikator utama kemiskinan. Kemudian faktor lainnya adalah perilaku tidak baik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme juga berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial ekonomi.

Kemiskinan tidak hanya diakui sebagai hambatan finansial tetapi juga dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak-hak dasar dan perlakuan yang tidak setara bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Tidak terpenuhinya beberapa hak yang umumnya diakui seperti perlindungan dari pelecehan atau ancaman kekerasan, kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, penyediaan makanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sumber daya lahan, dan lingkungan dapat menyebabkan permasalahan sosial. Seiring dengan munculnya berbagai masalah sosial, kemiskinan memiliki sejumlah efek merugikan yang dapat menghambat kemajuan ekonomi suatu bangsa. Pembangunan ekonomi secara tidak langsung akan menderita akibat tingginya angka kemiskinan yang meningkatkan biaya pembangunan.

Pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan, namun upaya tersebut tampaknya belum memberikan

dampak yang memuaskan. Hal ini terjadi karena program dan kebijakan lebih berorientasi pada program sektoral saja. Sehingga diperlukan strategi yang lebih spesifik, terintegrasi dan sinergi untuk menuntaskan masalah lingkaran kemiskinan.

Selain itu, dalam rentang waktu 2019 hingga tahun 2021, Indonesia sendiri sempat mengalami krisis ekonomi tepatnya sejak bulan maret tahun 2020 hingga kini akibat fenomena pandemic covid-19. Pandemic covid-19 ini merupakan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. Kasus ini berasal dari Kota Wuhan, China yakni pada akhir bulan desember 2019 yang kemudian menyebar dan menghebohkan dunia. Penyebaran dan peningkatan kasus covid-19 di Indonesia sendiri berdampak pada pemerosatan pertumbuhan ekonomi. Dampak pada sektor ekonomi antara lain penurunan impor, inflasi, kelangkaan, kerugian sektor pariwisata, serta terjadinya PHK yang menyebabkan banyak orang menganggur akibat kebijakan pemerintah tersebut. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi di Indonesia.¹

Berikut merupakan data kemiskinan yang dilihat dari banyaknya penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah serta beberapa faktor penyebabnya antara lain IPM, tingkat pengangguran perkapita dan PDRB:

Tabel 1.1

VARIABEL	2019	2020	2021
IPM	71,73	71,87	72,16
TPT	4,44	6,48	5,95
PDRB	39 388,15	36 983,99	38 669,11
JUMLAH PENDUDUK MISKIN	3 743,23	3 980,90	4 109,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2022

¹ Fakhrol Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2020): 384, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang artinya apabila nilai IPM bertambah maka jumlah kemiskinan akan turun begitu sebaliknya.² Akan tetapi dalam data tersebut terdapat perbedaan antara teori dengan data yang ada dimana pada tahun 2020 ke 2021 nilai IPM naik diikuti jumlah penduduk penduduk miskin juga naik.

Sedangkan pengangguran secara teori memiliki hubungan positif dengan kemiskinan, artinya jika orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan serta tidak menganggur dianggap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penghasilan tersebut. Kemiskinan tidak akan ada jika kebutuhan dasar terpenuhi. Akibatnya, tingkat kemiskinan juga rendah karena tingkat pengangguran yang rendah (pilihan kerja yang kuat).³ Dalam data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020 menuju 2021 terdapat penurunan presentase pengangguran namun jumlah penduduk miskin justru mengalami kenaikan pada tahun yang sama.

Fenomena lain terjadi pada variabel produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah dimana secara umum PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, harusnya jumlah orang miskin akan berkurang atau berkurang ketika PDRB naik, dan sebaliknya. Akan tetapi dalam rentang tahun 2019 sampai 2021 berdasarkan data tersebut terdapat ketidaksinambungan antara teori dengan data dimana tahun 2020 menuju 2021 data PDRB naik akan tetapi data kemiskinan juga naik.

Pemerintah Indonesia sendiri juga telah melakukan berbagai upaya pembangunan nasional terkhusus kepada daerah yang relative tertinggal. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memperhatikan tujuan dan kebutuhan masing-masing daerah serta membangun

² Rivo Maulana, Agus Joko Pitoyo, and Muhammad Arif Fahrudin Alfana, "Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017," *Media Komunikasi Geografi* 23, no. 1 (2022): 12–24, <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.39301>.

³ Yarlina Yacoub, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat" 8 (2012): 176–85.

pertumbuhan jangka panjang dan jangka pendek yang menjadi landasan pembangunan nasional. Jadi, salah satu indikator terpenting tentang seberapa baik suatu negara berkembang adalah tingkat penurunan jumlah orang miskin. Pemilihan strategi atau alat pengembangan nasional memiliki pertimbangan utama yang dapat dilihat dari tingkat efektifitas penurunan jumlah penduduk miskin pada negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penentu utama sektor fokus atau sektor andalan pertumbuhan nasional adalah efektivitas pengurangan jumlah penduduk miskin.⁴

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor terjadinya kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia yang tercermin dari rendahnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM) akan menyebabkan produktivitas yang rendah dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan yang mereka terima sehingga menjadikan jumlah penduduk miskin bertambah. Menurut Rossalia, IPM adalah indeks komposit yang dibuat dengan rata-rata tiga indeks yang mengukur kemampuan seseorang untuk memperluas pilihan mereka, termasuk indeks harapan hidup, indeks standar hidup layak, dan indeks pendidikan.⁵

Faktor lain penyebab kemiskinan adalah rendahnya angka PDRB di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk melacak pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu dan menentukan arah perekonomian daerah. Salah satu perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengentasan kemiskinan serta tolak ukur seberapa berhasil pemerintah menggunakan sumber daya yang tersedia dapat dilihat dari tingkat PDRB daerah.⁶

Selain faktor –faktor diatas terdapat factor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu pengangguran. Secara matematis indicator pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan, sehingga jika tingkat pengangguran naik maka angka kemiskinan juga akan naik, begitu pula

⁴ Pantjar Simatupang and Saktyanu K. Dermoredjo, "Produksi Domestik Bruto, Harga Dan Kemiskinan: Hipotesis 'Trickle Down' Dikaji Ulang," *Ekonomi Dan Keuangan Indonesia* 51, no. 3 (2003): 291–324.

⁵ Rossalia (2019)

⁶ Dio Syahrullah, "Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012," 2014.

sebaliknya⁷. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang padat, yang tentunya lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Hal tersebut menjadikan masalah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah belum dapat teratasi dengan baik.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ridho Andyka, dkk (2018) tentang Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Waseso Segoro, dkk (2016) tentang Analisis Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2012 menyimpulkan bahwa Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan Manisha Elok Sholikhati, dkk (2020) dalam penelitiannya tentang Analisis PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Investasi PMA Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah 2011-2016 menyebutkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Proses pertumbuhan suatu bangsa meliputi pembangunan ekonominya guna mensejahterakan penduduk dan juga masyarakat wilayah tersebut⁸. Dalam mengartikan pembangunan ekonomi para ekonom sering menyebutnya dengan istilah "*economic development is growth plus change*" yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian diikuti oleh perubahan lain dalam struktur maupun corak kegiatan ekonomi Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk menurunkan

⁷ Rossalia, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran Dan Zakat Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2012-2017."

⁸ Khairur dan Telisa Aulia Falian Raziqiin and Telisa Aulia Falian, "Analisis Dampak Kepemilikan Surat Berharga Oleh Bpd Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah," *Majalah Ilmiah Bijak* 14, no. 1 (2018): 32–47, <https://doi.org/10.31334/bijak.v14i1.58>.

angka kemiskinan saat ini. Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk menurunkan angka kemiskinan saat ini⁹.

Islam sendiri memandang kemiskinan sebagai bentuk musibah yang bisa membahayakan akhlak, keimanan, serta kelogisan berpikir seseorang dan juga masyarakat yang seharusnya memohon perlindungan Allah swt. Atas kejahatan didalamnya.¹⁰ Oleh karena itu, islam memberi dorongan kepada setiap individu untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya dalam rangka menentang seseorang menjadi pengangguran. Seperti dalam firman Allah swt :

قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ –
١٣٥

Artinya:“Katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.”¹¹

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa islam mewajibkan seorang atau individu untuk bekerja keras. Pemerintah diharuskan membangun infrastruktur dan kebijakan untuk meminimalkan jumlah orang miskin dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka saat ini jika seseorang memilih untuk tidak bekerja karena malas, cacat, atau kurangnya keterampilan dan sumber daya.

Selain dalam Al-Qur’an , Nabi saw. juga telah menjelaskan mengenai bahaya kemiskinan (kefakiran) dimana beliau memberikan gambaran bahwasanya kefakiran itu mendekati kekufuran sebagaimana Hadist yang dikeluarkan oleh imam Al-Baihaqi dalam kitab syu’abul iman no. 6612 berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ
كُفْرًا

⁹ Fatkhul Mufid Cholili, “Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). Jurnal Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 5 (2014): 557–77.

¹⁰ Kiky Aprianto and Naerul Edwin, “Kemiskinan Dalam ...” 8, no. 2 (2017): 169–88.

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/6> diakses pada 18 March 2022

Dari Anas bin Mâlik Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran”¹².

Menurut Manawy dan Huda, kefakiran merupakan salah satu jalan menuju kekufuran, maka ada hubungan yang erat antara keduanya. Dimana seorang fakir pada umumnya menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu. Dari segala upaya yang bertujuan pada kedengkian tersebut dapat meniadakan agamanya juga menimbulkan ketidakridhaan pada takdir allah swt. Akhirnya tanpa disadari akan membuat seorang tersebut mencela rezeki yang telah allah berikan kepadanya.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu di dalam penelitian ini juga akan dilihat seberapa besar pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2021 serta bagaimana pandangan islam mengenai kemiskinan.

2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019-2021?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019-2021?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019-2021?
4. Bagaimanakah kemiskinan dalam perspektif islam ?

2.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019-2021?

¹² Abdullah bin Taslim al-Buthon “HADITS LEMAH TENTANG DEKATNYA KEMISKINAN DENGAN KEKAFIRAN”

Referensi : <https://almanhaj.or.id/4115-hadits-lemah-tentang-dekatnya-kemiskinan-dengan-kekafiran.html>

diakses pada 9 maret 2023

¹³ Aprianto and Edwin, “Kemiskinan Dalam”

2. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019-2021?
3. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019-2021?
4. Untuk mengetahui bagaimana kemiskinan dalam perspektif islam

2.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya ekonomi pembangunan islam serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lanjutan bagi mahasiswa maupun pihak lain yang tertarik dengan topic kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait penyebab kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah serta dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

2.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan sedemikian rupa, sehingga apa yang dikemukakan akan lebih mudah dipahami. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka , yang didalamnya membahas landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III : Metodologi penelitian, dalam bab ini akan membahas mengenai pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan teknik sampling, teknis analisis data, serta uraian variabel penelitian.

Bab IV : Hasil dan pembahasan, berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan, serta saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang, keluarga, masyarakat, atau Negara memiliki batasan-batasan yang mempersulit hidup dan membuat mereka tersisih dalam berbagai profesi karena tidak dapat dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya.¹⁴

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2022) kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dalam sisi ekonomi untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga yang dikategorikan penduduk miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluaran perkapita kurang dari garis kemiskinan. Sedangkan untuk pengukuran kemiskinan sendiri menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dari sisi ekonomi bukan dari sisi pengeluaran yang mengacu pada *handbook on poverty and inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*.¹⁵ Garis kemiskinan pangan ditentukan berdasarkan kebutuhan energi.

Menurut usulan Widyakarya dalam Pangan dan Gizi Nasional (WNPG) 1978, kebutuhan kalori minimum penduduk Indonesia per hari adalah 2.100 kkal. Karena adanya perluasan komoditas di masing-masing daerah sebagai hasil dari teknik ini, keranjang pangan nasional sekarang terdiri dari 52 jenis komoditas yang berbeda. Garis kemiskinan non makanan ditentukan dengan memperhitungkan 47 komoditas di pedesaan dan 51 komoditas di perkotaan.

¹⁴ Prima Sukmaraga, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah," *Harvard Business Review* 85, no. 3 (2011): 21–22.

¹⁵ <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1> diakses pada tanggal 2 Desember 2022

Komoditas ini meliputi perumahan, sandang dan alas kaki, perawatan kesehatan, pengeluaran pendidikan, perawatan kesehatan, serta produk dan jasa lainnya.¹⁶

Jumlah minimum kalori per orang di Indonesia telah diperbarui menjadi 2.150 kilokalori untuk mencerminkan perubahan pola konsumsi penduduk. Penyesuaian tersebut berdasarkan hasil WNPg Tahun 2012 dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) terbaru dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Kecukupan Gizi . Agar data akurat, lengkap dan mencerminkan kebutuhan basis penduduk, kriteria baru penghitungan penduduk miskin perlu dimodifikasi untuk memperhitungkan perubahan pola konsumsi penduduk.

Garis kemiskinan adalah batas pendapatan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan pokok makanan dan nonmakanan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non makanan dengan rumus sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

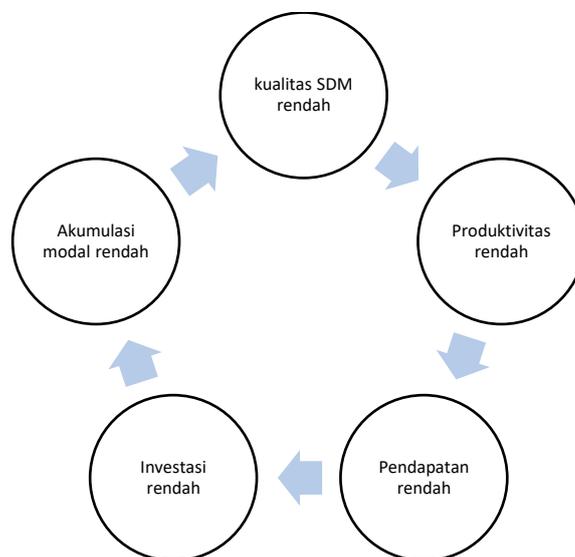
Menurut Mudrajat Kuncoro “lingkaran setan kemiskinan” dikemukakan oleh Ragnar Nurkse penyebab utama kemiskinan adalah: (1) keterbelakangan sumber daya manusia (SDM), yang diukur dengan indeks pembangunan manusia; (2) kelemahan di pasar; dan (3) produktivitas rendah karena kekurangan modal. Produktivitas yang rendah akan menghasilkan pendapatan yang rendah (yang tercermin dari rendahnya PDRB per kapita). Pendapatan yang buruk berdampak

¹⁶ Ardi Adji et al., “Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoretis Dan Usulan Perbaikan,” *Tnp2K*, 2020, 1–36.

pada rendahnya tingkat investasi dan tabungan. Investasi yang rendah akan menyebabkan kurangnya modal. Selain itu, tingkat akumulasi modal yang rendah membuat proses penciptaan lapangan kerja menjadi lemah (yang tercermin dari tingginya angka pengangguran). Akumulasi modal yang buruk akibat tertinggal menyebabkan keterbelakangan, begitu pula sebaliknya.¹⁷

Gambar 2.1

Lingkaran Setan Kemiskinan Nurkse



Sumber: R. Nurkse, 1953

Kemiskinan dibagi menjadi empat jenis yaitu:¹⁸

- a. Kemiskinan absolut, keadaan dimana seseorang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja . Menurut

¹⁷ Riana Puji Lestari, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 53, no. 9 (2017): 1689–99.

¹⁸ Cholili, "Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Ekonomi.*"

Internasional Labor Organization (ILO) kebutuhan pokok sendiri terbagi menjadi dua. *Pertama*, kebutuhan minimum berupa papan, pangan, dan sandang. *Kedua*, kebutuhan layanan sosial berupa air bersih, kebutuhan budaya dan pendidikan. Maslow juga menambahkan kebutuhan dalam kebebasan berpendapat, pengakuan dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, penentuan garis kemiskinan sulit dilakukan secara objektif.¹⁹

b. Kemiskinan relative, kondisi kemiskinan akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga terjadi ketimpangan pendapatan. Kesenjangan distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan tiga alat ukur, yaitu:²⁰

1) Indeks entropi (*generalized entropy*). Nilai entropi biasanya lebih besar dari nol. Sehingga semakin besar nilai entropi maka semakin besar pula kesenjangan pendapatan disuatu negara atau wilayah. Parameter yang digunakan sebagai alat ukur adalah α .

2) Indeks atkinson (*atkinson measure*). Dalam indeks ini parameter yang digunakan sebagai alat ukur adalah ϵ dengan nilai ketimpangan $0 < \epsilon < 1$. Artinya semakin tinggi nilai ϵ maka semakin besar ketimpangan distribusi antar golongan masyarakat.

3) Indeks gini (*gini ratio*). Indeks ini umumnya digunakan untuk menghitung kesenjangan pendapatan di suatu masyarakat secara empiris. Nilai gini adalah antara 0 dan 1, artinya apabila nilai gini menunjukkan angka 0 maka tingkat pemerataan dikatakan sempurna dan sebaliknya. Apabila nilai gini semakin besar maka pemerataan semakin tidak sempurna. Berikut adalah tingkat ketidakmerataan pendapatan berdasarkan nilai gini :

- i. 0,50 – 0,70 : ketidakmerataan tinggi
- ii. 0,36 – 0,49 : ketidakmerataan sedang
- iii. 0,20 – 0,35 : ketidakmerataan rendah

¹⁹ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro Teori, Soal, dan Penyelesaiannya*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2018) h. 232

²⁰ *Ibid*, h.233

- c. Kemiskinan kultural, kondisi ini mengacu pada permasalahan sikap seseorang maupun masyarakat akibat factor budaya. Merasa cepat puas, bermalas-malasan serta cara pikir yang kurang rasional merupakan penyebab teradinya kemiskinan kultural.²¹
- d. Kemiskinan structural, kondisi kemiskinan akibat rendahnya akses terhadap sumber daya dalam suatu system pemerintah yang kurang mendukung pengentasan kemiskinan.

Menurut Supriatna (1997:82), ada lima karakteristik penduduk miskin²², antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
- b. Kurangnya kemampuan untuk membeli aset produksi dengan menggunakan sumber daya sendiri.
- c. Tingkat pendidikan biasanya buruk.
- d. Banyak orang kekurangan fasilitas.
- e. Beberapa dari mereka masih sangat muda dan tidak memiliki pendidikan atau kemampuan yang diperlukan.

Islam sendiri memandang kemiskinan sebagai salah satu jenis bencana yang dapat merusak moral, agama, dan nalar seseorang serta masyarakat secara keseluruhan, sehingga perlu memohon perlindungan Allah swt. Karena dampak buruk di dalamnya.²³ Oleh karena itu, islam memberi dorongan kepada setiap individu untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya dalam rangka menentang seseorang menjadi pengangguran. Seperti dalam firman Allah swt :

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ - ١٣٥

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa

²¹ Ibid, h. 231

²² Yulianto Kadji, “Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya”

²³ Aprianto and Edwin, “Kemiskinan Dalam”

yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.”²⁴

Sebenarnya definisi kemiskinan dalam perspektif Islam sedikit berbeda dengan definisi tradisional. Dalam Islam, ada dua kategori orang miskin: fakir dan miskin.²⁵ Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kondisi orang fakir lebih buruk daripada orang miskin. Allah SWT menyebut kata "fakir" sebelum kata "miskin" dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”²⁶

Dari ayat tersebut Abi Abdullah al-Qurtubi mendefinisikan bahwa al-fuqara', mufrad kata faqir memiliki arti seseorang yang sangat menderita karena kemiskinan hidupnya dengan menggambarkannya sebagai orang yang tidak memiliki kekayaan dan usaha yang dapat diandalkan untuk mendukung kebutuhannya.²⁷ Sedangkan definisi kemiskinan mazhab Syafi'i dan Hambali adalah mereka yang kekurangan sesuatu, memiliki sesuatu tetapi tidak cukup, atau juga bisa merujuk pada mereka yang lemah dan hina. Sebagaimana di isyaratkan dalam QS. Al-Kahfi ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩

Artinya : “Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.”

²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/6> diakses pada 18 March 2022

²⁵ Lestari, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015.”

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/60> diakses 6 desember 2022

²⁷ Syaiful Ilmi, “Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam”

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan bukanlah salah satu kekurangan yang melampaui kebutuhan mendasar.²⁸ Terdapat beberapa penyebab kemiskinan dalam perspektif Islam²⁹ antara lain:

- a) Kemiskinan yang timbul karena kejahatan manusia terhadap alam dimana manusia tidak dapat mengelola serta memanfaatkan alam dengan baik. Sebagaimana QS. Asy-Syura ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ ٣٠

Artinya : “Musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan (Allah) memaafkan banyak (kesalahanmu)”³⁰

- b) Kemiskinan timbul karena kebakhilan dan ketidakpedulian orang kaya terhadap orang-orang miskin. Sesuai dengan firman Allah swt. Qs. Al-Imron ayat 180 :

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١٨٠

Artinya : “Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³¹

- c) Kemiskinan yang timbul akibat sebagian manusia bersikap dzalim dan eksploitatif terhadap sesamanya. Seperti firman Allah swt. Dalam QS. An-nisa’ ayat 2 :

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاُخْبِيثَ بِالطَّبِيبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ ٢

Artinya : “Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”³²

²⁸ Nurul Huda, “Ekonomi Pembangunan Islam”, (Jakarta : Prenada media Grup,2015), hlm.23

²⁹ Sri Budi Cantika, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2014): 101, <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>.

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/180> diakses pada tanggal 6 Desember 2022

³¹ Ibid, h.106

³² <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/2> diakses pada tanggal 6 Desember 2022

Menurut Irfan Syauqi (2015) pengukuran kemiskinan dalam ekonomi islam dapat diukur menggunakan kuadran CIBEST yang terbuat berdasarkan kriteria kebutuhan dasar material dan spiritual dalam rumah tangga sebagai unit analisis. Kuadran tersebut terbagi menjadi empat kuadran yaitu : welfare quadrant (kesejahteraan), material poverty (kemiskinan material), spiritual poverty (kemiskinan spiritual), dan absolute poverty quadrant (kemiskinan absolut).³³

Menurut Amuda & Embi (2013) pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan menekankan integrasi dana sosial dalam islam berupa zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Pengelolaan dana sosial tersebut difokuskan pada investasi guna menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Organisasi kerjasama islam (OIC) menyarankan investasi tersebut dalam beberapa sektor antara lain pendidikan, agrikultur dan UMKM.³⁴

Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan Nurkse terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut:

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS Kota Semarang yang mengutip dalam Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990 , pembangunan manusia merupakan suatu proses guna memperbanyak pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara pilihan tersebut yang terpenting adalah berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan serta memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan sehingga dapat hidup layak.³⁵

³³ Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 87–104, <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>.

³⁴ Muhammad Iqbal, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah*, 2017, 10.

³⁵ <https://semarangkota.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1> diakses pada tanggal 6 Desember 2021 jam 22:32 WIB

Berdasarkan elemen fundamental dari kualitas hidup, indeks pembangunan manusia berfungsi sebagai ukuran pembangunan manusia.³⁶

Adapun tujuan penting dari IPM adalah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan sejumlah indikator guna menjaga ukuran yang sederhana
- b. Membangun indikator yang dapat mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih
- c. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi
- d. Membentuk satu indeks komposit

Kurangnya pemahaman akan pentingnya situasi dan sebaliknya kurangnya sosialisasi tentang hal tersebut yang mengakibatkan rendahnya prestasi kita di kancah internasional merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapaian. keberhasilan IPM, hal ini terlihat dari banyaknya indikator IPM yang belum terpenuhi.³⁷

IPM adalah indikator komposit yang terdiri dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak, yang secara bersama-sama menunjukkan kapasitas fundamental masyarakat untuk meningkatkan pilihan mereka, yang dirumuskan sebagai berikut:³⁸

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Keterangan :

X1 = Indeks harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

³⁶ Sukmaraga, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah."

³⁷ Cholili, "Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). Jurnal Ekonomi."

³⁸ Rossalia, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran Dan Zakat Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2012-2017."

X3 = Indeks Standart Hidup Layak

Berdasarkan konsep rumus tersebut, jelas tergambar bahwa kesehatan atau (angka harapan hidup) merupakan faktor penentu kualitas manusia itu sendiri. Sedangkan faktor pendidikan dan kemampuan ekonomi merupakan faktor pendukung.³⁹ Variabel yang digunakan dalam perhitungan IPM metode baru terdiri dari:

- 1) Angka Harapan Hidup Saat Lahir yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang bisa ditempuh seseorang sejak lahir. Angka ini merupakan cerminan derajat kesehatan pada suatu masyarakat.
- 2) Rata-rata Lama Sekolah yang didefinisikan sebagai jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal. Hasil rata-rata sekolah dihitung berdasarkan cakupan penduduk berusia 25 tahun ke atas.
- 3) Angka Harapan Lama Sekolah yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diinginkan oleh anak dimasa depan. Angka ini dihitung berdasarkan penduduk berusia 7 tahun.
- 4) Pengeluaran Perkapita Disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita serta *purchasing power parity*. Perhitungan pengeluaran perkapita diperoleh dari level provinsi hingga level kabupaten/kota berdasarkan Susenas. Sedangkan paritas daya beli dihitung menggunakan 96 komoditas, 66 komoditas makanan dan sisanya komoditas nonmakanan.

Capaian IPM dapat dilihat berdasarkan pengelompokan beberapa kategori⁴⁰, diantaranya adalah:

$IPM < 60$: IPM rendah

$60 \leq IPM < 70$: IPM sedang

$70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi

³⁹ Tri Wahyuningsih, *Ekonomi Publik*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2019) h.301

⁴⁰ *Ibid*, h.304

IPM \geq 80 : IPM sangat tinggi

Pembangunan ekonomi dalam perspektif islam memiliki karakteristik yang berbeda. Tujuan pembangunan ekonomi dalam islam adalah tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam perspektif islam alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah I-HDI (*Islamic Human Development Index*). Terdapat lima dimensi untuk perhitungan I-HDI, yang akan mengukur kinerja dari Material Welfare (MW) dan NonMaterial Welfare (NW). I-HDI mengukur tingkat kesejahteraan manusia dengan memenuhi kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Imam al-Syatibi mengatakan bahwa mashlahah dasar kehidupan manusia terdiri dari lima hal: ⁴¹

a. Agama (dien)

Kebutuhan yang paling krusial bagi manusia adalah agama. Islam mengajarkan bahwa agama memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai ritualitas namun lebih kepada memberikan pedoman dalam berkehidupan serta membangun moral dalam diri manusia. Berikut adalah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *hifdzu ad-dien* :

QS. Ali Imron (3): 114. Perintah Amar Ma'ruf Nahi Munkar

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan 33 bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.”

b. Jiwa (nafs)

Hidup harus dilindungi dan dijaga. Segala sesuatu yang dapat mendukung kehidupan otomatis diperlukan, dan idealnya segala sesuatu yang mengancam kehidupan atau meningkatkan risiko kematian harus

⁴¹ “ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX DI KAWASAN EKSPLORASI TAMBANG BATU BARA DI BATU SOPANG KALIMANTAN TIMUR Islamic Human Development Index In The Expploration Of Mine Coal Mining In Batu Sopang East Kalimantan Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyar,” 2018.

dihindari. Seperti ayat al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 195. Larangan Menjatuhkan Diri ke dalam Kebinasaan :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

c. Intelektual ('aql)

Sehubungan dengan intelektual atau Pendidikan, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang mukmin untuk menuntut Ilmu. Seperti firman Allah swt. QS. al-'Alaq (96): 1. Perintah Untuk Menuntut Ilmu :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.

d. Keluarga dan keturunan (nasl),

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (nasl). Seperti ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hifdzu an-nasl antara lain sebagai berikut:

QS. an-Nuur (24): 32. Perintah untuk Menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

e. Material (maal)

Harta material (maal) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, rumah, kendaraan dll., untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hifdzu maal antara lain sebagai berikut :

QS. al-Jumu'ah (62): 10. Perintah untuk Mencari Karunia Allah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Kelima dimensi ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

2.1.3 Pengangguran

Menurut Sukirno (1997) , pengangguran adalah suatu kondisi dimana seseorang yang termasuk angkatan kerja aktif dan ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya.⁴² Terdapat dua jenis pengangguran yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya.⁴³

a. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penyebabnya pengangguran terbagi menjadi empat golongan antara lain:

1) Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran normal adalah kondisi dimana terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja dalam suatu ekonomi yang dipandang telah mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran ini terjadi bukan karena mereka tidak memiliki pekerjaan akan tetapi karena mereka sedang mencari pekerja yang lebih baik sesuai keinginan dan kualifikasi pribadi masing- masing.

2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah kondisi dimana permintaan agregat suatu ekonomi menurun drastis yang menyebabkan perusahaan mengurangi

⁴² Cholili, “Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). Jurnal Ekonomi.”

⁴³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) h.328

pekerja atau bahkan menutup usahanya sehingga menambah jumlah pengangguran.

3) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Beberapa faktor perubahan kegiatan produksi yang menyebabkan pekerja terpaksa dihentikan dan menjadi penganggur tersebut antara lain adanya kemajuan teknologi, biaya pengeluaran perusahaan yang tinggi, adanya barang baru yang lebih baik sehingga menjadikan permintaan akan barang lama berkurang serta perusahaan tidak mampu bersaing .

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan mesin serta kemajuan teknologi. Hal itu timbul karena penggantian tenaga manusia dengan mesin dan teknologi yang ada saat ini. Seperti halnya perusahaan sekarang adakalanya mengganti tenaga pekerja dengan robot yang canggih.

b. Pengangguran berdasarkan ciri-cirinya

Berdasarkan ciri-cirinya pengangguran digolongkan dalam empat jenis sebagai berikut:

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka muncul akibat lowongan pekerjaan yang kurang memadai, dimana penambahan tenaga kerja yang lebih besar dari lowongan pekerjaan yang ada. Hal ini menyebabkan mereka menganggur sepenuh waktu dan nyata dalam jangka panjang. Penyebab lain terjadinya pengangguran terbuka adalah penurunan ekonomi disuatu wilayah atau negara serta dampak kemajuan teknologi sehingga mengurangi tenaga kerja.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi digolongkan sebagai kelebihan tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan harapan pekerjaan lebih

efisien. Pengangguran ini dapat ditemukan pada sektor pertanian maupun jasa.

3) Pengangguran Bermusim

Pengangguran bermusim umumnya ditemukan dalam sektor pertanian dan perikanan. Dimana pada musim hujan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka untuk mencari ikan di laut dan pada musim kemarau petani tidak terlalu aktif mengerjakan tanahnya. Hal tersebut yang menyebabkan mereka terpaksa menganggur.

4) Setengah Menganggur

Pengangguran jenis ini merupakan akibat migrasi dari desa ke kota. Sehingga ketika di kota sebagian dari mereka menganggur sepenuh waktu dan sebagian yang lain bekerja dengan jam bekerja lebih rendah dari jam normal.

Sedangkan menurut Edgar O. Edwards bentuk-bentuk pengangguran ada empat yaitu:

- a. Pengangguran terbuka adalah kondisi dimana mereka mampu dan sangat ingin bekerja akan tetapi belum tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
- b. Setengah pengangguran adalah kondisi dimana mereka bekerja penuh namun produktifitasnya rendah sehingga mengurangi jam kerja namun tidak memiliki arti atas produksi secara keseluruhan.
- c. Tenaga kerja lemah adalah mereka yang bekerja penuh namun intensitasnya lemah karena penyakitan maupun kurang gizi.
- d. Tenaga kerja tidak produktif adalah mereka yang mampu bekerja produktif namun tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) pengangguran terbuka terdiri dari:

- a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha.

- c. Mereka yang tidak punya pekerjaan namun tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Adapun yang dimaksud tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.⁴⁴

Islam menganjurkan dan memberikan kewajiban kepada umatnya untuk bekerja dan menghasilkan terlebih bagi orang-orang yang mampu. Karna sesungguhnya Allah swt. Akan memberikan balasan sesuai ama yang dikerjakan. Sesuai dengan firman allah surah at-talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”(QS AthThalaq :7)

Namun kenyataannya, negara dengan mayoritas muslim masih memiliki tingkat penganguan yang relative tinggi. Terdapat beberapa cara yang dianjurkan oleh islam guna menanggulangi pengangguran⁴⁵ :

- a Mekanisme sosial ekonomi
- b Negara wajib menciptakan lapangan pekerjaan yang mumpuni
- c Negara menyediakan jaminan sosial
- d Negara harus memiliki hubungan baik terhadap pengusaha maupun buruh
- e Mengoptimalkan sumber pendapatan seperti ZISWAF

⁴⁴ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1> diakses 8 Desember 2021 jam 09:39 WIB

⁴⁵ A H Doni et al., “Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Kovensional,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 2022, 1–10, <https://jiemas.stai-dq.org/index.php/home/article/view/20%0Ahttps://jiemas.stai-dq.org/index.php/home/article/download/20/23>.

- f. Mengoptimalkan pengelolaan dana pembangunan yang berpengaruh terhadap penurunan pengangguran

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu metrik untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita menurut BPS (2021) dihitung dengan membagi pendapatan daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Kemampuan pengelolaan sumber daya pada suatu daerah dapat digambarkan dengan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur semua nilai tambah yang dihasilkan oleh keseluruhan kegiatan produksi dalam perekonomian daerah (PDRB).⁴⁶

Karena potensi sumber daya alam dan faktor produksi lainnya, jumlah PDB yang diciptakan di berbagai tempat sangat bervariasi.⁴⁷ Serta didasarkan pada konsep aliran produk, perhitungan PDRB hanya memperhitungkan nilai barang yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Karena ekonomi daerah (ekonomi domestik) merupakan salah satu faktor penentu PDRB, maka dapat ditentukan seberapa besar kebijakan ekonomi pemerintah daerah dapat mendorong kegiatan ekonomi domestik.⁴⁸ PDRB sendiri didukung oleh Sembilan sektor utama antara lain:⁴⁹

- a. Pertanian
- b. Industry
- c. Bangunan
- d. Pertambangan dan penggalian
- e. Listrik, gas dan air minum

⁴⁶ David C, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 179

⁴⁷ Sukmaraga, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah."

⁴⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.26

⁴⁹ Lestari, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015."

- f. Jasa
- g. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- h. Pengangkutan dan komunikasi
- i. Perdagangan, hotel dan rumah makan.

Ekonomi Islam berpandangan bahwa suatu bangsa harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. sehingga setiap orang dalam masyarakat dapat bertahan hidup dengan kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Akibatnya, negara harus mengontrol bagaimana sumber daya digunakan dalam ekonomi untuk memastikan bahwa mereka didistribusikan secara adil dan merata dan bahwa tidak ada anggota masyarakat yang dirugikan dengan cara apa pun ketika mengakses sumber daya ekonomi, baik oleh negara atau pihak lain.⁵⁰ Sesuai firman Allah swt. Surah An-Nahl (16):90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS: An-Nahl 16:90)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Metode	Kesimpulan
1	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM),	X1 = IPM X2=Pertumbuhan Ekonomi X3=Pengangguran Y=Kemiskinan	path analysis (analisis jalur) dengan bantuan software WarpPLS 5.0	variabel IPM berpengaruh secara langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan

⁵⁰ Muhammad Taufiq, “Analisis Efektifitas Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari Ekonomi Islam,” *Universitas Islam Indonesia*, 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/19923>.

	Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia ⁵¹			pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Serta pengangguran dapat menjadi mediator antara IPM dan Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.
2	Analisis Pengaruh Pdrb, Tingkat Pengangguran, Dan Ipm Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah ⁵²	X1= PDRB X2=Pengangguran X3=IPM Y=Tingkat kemiskinan	regresi data panel yaitu <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) atau disebut juga <i>Least Square Dummy Variable</i>	variabel laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan
3	Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten /	X1=Belanja modal pemerintah X2= tenaga terserap X3= IPM Y=Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan	<i>Structural Equation Modeling</i> dengan AMOS 20 Program	Hipotesis 1 menyatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 2 menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 3 menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh

⁵¹ Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>.

⁵² Ridho Andhykha, Herniwati Retno Handayani, and Nenik Woyanti, "Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Media Ekonomi Dan Manajemen* 33, no. 2 (2018): 113–23, <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>.

	Kota Di Provinsi Jawa Tengah) ⁵³			positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 4 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hipotesis 5 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia adalah efek signifikan negatif terhadap kemiskinan.
4	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah ⁵⁴	X1=Pertumbuhan ekonomi X2=IPM X3=Inflasi X4=pengangguran Y= tingkat kemiskinan	metode analisis data panel atau kombinasi antara deret waktu (time series) dengan analisis deret hitung (cross section) menggunakan Eviews 9 dengan model <i>random effect</i>	pertumbuhan ekonomi, ipm, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk uji F variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi, dan pengangguran secara bersama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan
5	Analisis Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto (Pdrb), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Pengangguran Terhadap	X1=PDRB X2=Inflasi X3=IPM X4=Pengangguran Y=Kemiskinan	regresi linier berganda pada program SPSS22	variabel PDRB dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Sedangkan IPM dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

⁵³ Santi Nurmainah, "Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manuis Terhadap Pertumbuhan," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20, no. 2 (2013): 131–41, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/3158/847>.

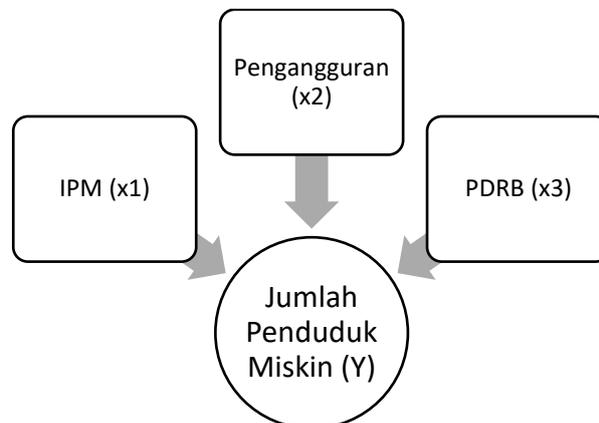
⁵⁴ Setyo Novianto, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 21–25, <http://www.elsevier.com/locate/scp>.

Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2012 ⁵⁵			
---	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sendiri tidak jauh berbeda dengan di pemerintah pusat (problem nasional) yakni belum tuntasnya upaya pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan issue strategis yang mendapat prioritas utama untuk ditangani. Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan dari Nurkse, terdapat tiga penyebab kemiskinan salah satunya yaitu indeks pembangunan manusia yang dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini selain tingkat pengangguran dan produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jumlah penduduk miskin sebagai variabel terikatnya. Berdasarkan teori diatas, peneliti menentukan kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka pemikiran



Keterangan :

Indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin

⁵⁵ Waseso Segoro and Muhamad Akbar Pou, "Analisis Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto (Pdrb), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2012," *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora* 6 (2016): 28–34, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/40>.

Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin

Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin

2.4 Hipotesis

Menurut J.Supranto hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman dalam penelitian berdasarkan teori terkait.⁵⁶ Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Salah satu faktor terjadinya kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari rendahnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Hal tersebut menyebabkan produktivitas yang rendah serta berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan yang mereka terima sehingga menjadikan jumlah penduduk miskin bertambah. Menurut Rossalia, IPM adalah indeks komposit yang dibuat dengan rata-rata tiga indeks yang mengukur kemampuan seseorang untuk memperluas pilihan mereka, termasuk indeks harapan hidup, indeks standar hidup layak, dan indeks pendidikan.⁵⁷ Dalam penelitian sebelumnya oleh Lestari (2017) bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan di Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.⁵⁸ Dari penelitian tersebut bahwa variable yang berpengaruh negative terhadap kemiskinan salah satunya adalah indeks pembangunan manusia. Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa :

⁵⁶ Sukmaraga, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah."

⁵⁷ Rossalia (2019)

⁵⁸ Lestari, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015."

H0: Indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah

H1 : Indeks pembangunan manusia berpengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Secara teori pengangguran memiliki pengaruh positif atau berbanding lurus dengan kemiskinan. Pengangguran menjadi salah satu factor yang menyebabkan kemiskinan. Secara matematis indicator pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan, sehingga jika tingkat pengangguran naik maka angka kemiskinan juga akan naik, begitu pula sebaliknya⁵⁹. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang padat, yang tentunya lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada . Hal tersebut menjadikan masalah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah belum dapat teratasi dengan baik. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh setya ningrum (2017) yang menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2018. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa praduga atau hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H0: Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah

H2: Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah

3. Pengaruh Produk Domestic Regiona Bruto Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

⁵⁹ Rossalia, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran Dan Zakat Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2012-2017."

Rendahnya angka PDRB di suatu daerah menjadi salah satu sebab terjadinya kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk melacak pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu dan menentukan arah perekonomian daerah. Salah satu perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengentasan kemiskinan serta tolak ukur seberapa berhasil pemerintah menggunakan sumber daya yang tersedia dapat dilihat dari tingkat PDRB daerah.⁶⁰ Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manisha Elok Sholikhati, dkk (2020) dalam penelitiannya tentang Analisis PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Investasi PMA Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah 2011-2016 menyebutkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Dari pernyataan tersebut dapat diperoleh dugaan bahwa :

H0 : Produk domestik regional bruto tidak berpengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah

H3: Produk domestik regional bruto berpengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah

⁶⁰ Dio Syahrullah, "Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012."

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang artinya mengimplementasikan kepustakaan dengan menggunakan buku, catatan, dan temuan-temuan kajian sebelumnya tentang kemiskinan⁶¹.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa numerik atau deklaratif yang dinilai dan dianalisis menggunakan analisis statistik.⁶² Dan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian asosiatif yang artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.⁶³

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berasal dari literatur buku-buku, jurnal penelitian, catatan maupun sumber yang berhubungan dengan laporan resmi mengenai variabel yang diteliti.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan deret berkala (*time series*) yaitu data dari tahun 2019-2021 sehingga menghasilkan 105 observasi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

⁶¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hal.97

⁶² Sugiono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan ke-15*, Alfabeta, Bandung, hal.14

⁶³ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hal.7

Data yang digunakan penelitian ini sepenuhnya adalah data sekunder. Kemudian data yang diperoleh tersebut diolah dan disusun sesuai tujuan dan kepentingan penelitian. Adapun data yang digunakan adalah data jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka dan PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah dan BPS Indonesia.

3.4 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah kategori luas yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data tahunan jumlah penduduk miskin, IPM, TPT, dan PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.

Sedangkan sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang tidak memiliki standar baku mengenai besarnya yang harus diteliti, yang terpenting sampel dapat mewakili karakteristik atau keanekaragaman populasi tersebut. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel sangat penting dalam suatu penelitian. Keterwakilan populasi sangat menentukan kebenaran kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh. Dimana semua anggota populasi menjadi sampel.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Alat uji analisis data menggunakan analisis data panel dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri atas uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan

⁶⁴ Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, and U I N Walisongo Semarang, "FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM," 2018.

uji heterokedastisitas. Dan untuk membantu analisis data peneliti menggunakan program aplikasi eviews 10.

1 Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan software eviews 10. Data panel merupakan data kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Regresi dengan menggunakan data panel sendiri disebut model regresi data panel.⁶⁵ Menurut berbagai literatur Ekonometrika, beberapa keuntungan model data panel adalah sebagai berikut: ⁶⁶

- a. Mampu menyediakan data observasi yang lebih banyak dan meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan).
- b. Dapat mengatasi masalah kolineritas, meminimalkan bias maupun *omitted-variable* (penghilangan variabel).
- c. Mampu mengontrol heterogenitas individu
- d. Estimasi model data panel dapat digunakan peneliti sebagai komparasi antarsampel.

Adapun bentuk umum model data panel dengan notasi '*it*' yang merupakan gabungan dari data *time series* dengan *cross section* adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \alpha + \mu_{it}$$

Dimana :

Y : variabel terikat

X : variabel bebas

β : parameter

⁶⁵ Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan eviews, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018) hal. 363

⁶⁶ Setyo Tri Wahyudi, Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan Eviews, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020) hal. 207

α : *unobserved factor*, menunjukkan nilai perbedaan antar *cross section*

μ : komponen error atau galat

Dalam analisis data panel terdapat tiga model yang dapat digunakan adalah sebagai berikut⁶⁷ :

1. *Common Effect Model (CEM)*

Pada model CEM dimensi waktu ataupun individu tidak diperhatikan, sehingga perilaku data *cross section* diasumsikan sama dalam beberapa kurun waktu. Untuk mengestimasi model data panel CEM dapat menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* atau kuadrat terkecil.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Pada model FEM nilai perbedaan antarindividu dapat berkorelasi dengan variabel bebas menggunakan metode estimasi OLS. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasi model FEM adalah *Least Square Dummy Variable (LSDV)*, *between estimator*, dan *within estimator*.

3. *Random Effect Model (REM)*

Pada model REM diasumsikan bahwa nilai perbedaan antarindividu tidak boleh berkorelasi dengan variabel bebas. Metode estimasi yang digunakan pada model ini adalah *Generalized Least Square (GLS)*.

Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)* karena jumlah n (jumlah observasi) lebih besar dari jumlah t (banyaknya waktu). Dengan asumsi bahwa perbedaan antarindividu dapat diakomodasi oleh intersepnya. Metode yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*.

Model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dengan fungsi berikut :

$$\text{Penduduk_Miskin} = \beta_0 + \beta_1 \text{IPM}_{it} + \beta_2 \text{TPT}_{it} + \beta_3 \text{PDRB}_{it} + \mu_{it}$$

⁶⁷ Ibid, 209-212

Namun karena ada perbedaan satuan hitung antar variabel maka model regresi yang digunakan merupakan hasil transformasi logaritma natural.

$$\text{LNPenduduk_Miskin} = \beta_0 + \beta_1 \text{IPM}_{it} + \beta_2 \text{TPT}_{it} + \beta_3 \text{LNPDRB}_{it} + \mu_{it}$$

Dimana :

$\text{Penduduk_Miskin}_{it}$: variabel terikat

IPM_{it} : variabel bebas 1

TPT_{it} : variabel bebas 2

PDRB_{it} : variabel bebas 3

Ln : transformasi logaritma natural

β : parameter

μ : komponen error atau galat

2 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik merupakan kriteria yang harus terpenuhi dalam model regresi yang menggunakan metode estimasi ols agar menghasilkan hasil yang tidak bias, konsisten, dan efisien atau biasa disebut BLUE (*Best Linear Unbiased estimator*). Terdapat tiga uji yang perlu dilakukan untuk estimasi dengan metodel OLS diantaranya adalah (i) pengujian normalitas; (ii) pengujian multikolinearitas; (iii) pengujian autokorelasi dan; (iv) pengujian heterokedastisitas.⁶⁸

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah sebaran data variabel dalam model penelitian. Data yang berdistribusi normal dianggap baik dan tepat dalam penelitian. Atas dasar pengambilan keputusan, uji *jarque-bera* dapat digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal. Jika nilai probabilitas jarque-fallow lebih besar dari taraf

⁶⁸ Setyo Tri Wahyudi, Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan Eviews,(Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020)hal.129

signifikansi 5% atau 0,05, hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai probabilitas *jarque-bera* kurang dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model penelitian mempunyai hubungan linier yang sempurna atau tidak. Secara umum, multikolinearitas mewakili korelasi yang tinggi antara variabel independen.⁶⁹ Untuk mengetahui multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen. Apabila koefisiennya $< 8,0$ maka data tidak terjangkit multikolinearitas. Begitu juga sebaliknya, jika nilai koefisien antarvariabel $>8,0$ maka data disimpulkan terjangkit multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Dalam regresi linier telah disyaratkan pemenuhan asumsi homogenitas dimana varians residual bersifat konstan. Sedangkan heterokedastisitas merupakan kondisi dimana varians residual tidak bersifat konstan.⁷⁰ Adanya heteroskedastisitas dapat mengakibatkan estimasi OLS tidak BLUE sehingga model menjadi efisien.⁷¹ Untuk menguji ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam model penelitian dapat dilakukan dengan uji glejser. Uji ini hampir sama dengan uji park, yang membedakan hanya pada variabel dependen dalam uji gleser menggunakan nilai absolut residual.

d. Uji Auto Korelasi

Autokorelasi adalah kondisi dimana adanya hubungan antar residual atau error antar waktu atau ruang dalam observasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai d_{hitung} dari hasil olah data eviws dengan nilai d_{tabel} atau biasa disebut uji *Durbin Watson*. Metode *Durbin*

⁶⁹ Anton Bawono, Arya Fendha Ibnu Shina, *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam Alikasi Dengan Eviews*, (Salatiga : LP2M IAIN Salatiga, 2018) hal.46

⁷⁰ Ibid, 53

⁷¹ Setyo Tri Wahyudi, *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan Eviews*,(Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020)hal. 188

Watson digunakan hanya untuk menguji autokorelasi tanpa lag (*lagged dependent variable*) dan *first order autoregressive* AR (1) ada variabel dependen dalam model penelitian.⁷²

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Opeasional

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variable bebas (variable independen) dan variable terikat (variable dependen) yaitu :

a. Variable bebas (variable independen) (x)

Variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau menjadi timbulnya variable terikat. Variable independen dalam penelitian ini adalah IPM (x1), tingkat pengangguran terbuka (x2), dan PDRB (x3) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.

b. Variable terikat (variable dependen) (y)

Variable terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya varibel lain (variable bebas). Variable dependen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional bertujuan agar variable penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan sehingga dapat memberikan petunjuk mengenai bagian suatu variable dapat diukur.⁷³ Berikut adalah definisi operasional dari masing-masing variable :

a. Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pangan ditentukan berdasarkan kebutuhan energi. Menurut usulan Widyakarya dalam Pangan dan Gizi Nasional (WNPG) 1978,

⁷² Nury Effendi, Maman Setiawan , *Ekonometrika Pendekatan Teori Dan Terapan*, (Jakarta : Salemba Empat,2014) Hal.71

⁷³ Lestari, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015."

kebutuhan kalori minimum penduduk Indonesia per hari adalah 2.100 kkal. Karena adanya perluasan komoditas di masing-masing daerah sebagai hasil dari teknik ini, keranjang pangan nasional sekarang terdiri dari 52 jenis komoditas yang berbeda. Garis kemiskinan non makanan ditentukan dengan memperhitungkan 47 komoditas di pedesaan dan 51 komoditas di perkotaan. Komoditas ini meliputi perumahan, sandang dan alas kaki, perawatan kesehatan, pengeluaran pendidikan, perawatan kesehatan, serta produk dan jasa lainnya.⁷⁴

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran dari pencapaian pembangunan manusia yang berbasis komponen-komponen dasar kualitas hidup.⁷⁵ Variabel yang digunakan dalam perhitungan IPM metode baru terdiri atas angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio jumlah pengangguran terhadap seluruh angkatan kerja⁷⁶ Pengangguran terbuka mencakup mereka yang menganggur dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang menganggur dan sedang bersiap untuk bekerja, mereka yang menganggur tetapi tidak mencari pekerjaan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, dan mereka yang bekerja tetapi belum mulai bekerja.

d. Produk Domestik Regional Bruto

⁷⁴ Adji et al., "Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoretis Dan Usulan Perbaikan."

⁷⁵ Cholili, "Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). Jurnal Ekonomi."

⁷⁶ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1> diakses pada tanggal 7 desember 2021 jam 23:44 WIB

PDRB adalah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan produksi dalam perekonomian daerah.⁷⁷ Penghitungan PDRB hanya mencakup nilai barang yang dihasilkan selama periode waktu tertentu karena didasarkan pada gagasan aliran barang. Daerah (perekonomian domestik) menjadi batasan dalam perhitungan PDRB.

⁷⁷ David C, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 179

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang berada di antara dua provinsi besar yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah disahkan pada tanggal 4 juli 1950 berdasarkan undang-undang no.10 tahun 1950 yang menetapkan pembentukan 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Jawa Tengah terletak antara 5o40' dan 8o30' Lintang Selatan dan 108o30' hingga 111o30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 kilometer, dan jarak terjauh dari utara ke selatan adalah 226 kilometer (tidak termasuk pulau Karimunjawa).⁷⁸

Visi Provinsi Jawa Tengah adalah : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” .sedangkan Misi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyup Untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Mempercepat Reformasi Birokrasi Serta Memperluas Sasaran Ke Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat Dan Memperluas Lapangan Kerja Untuk Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran
- d. Menadikan Masyarakat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya Dan Mencintai Lingkungan.⁷⁹

⁷⁸ <https://jatengprov.go.id/sejarah/> diakses pada 18 January 2023 jam 09.50

⁷⁹ <https://jatengprov.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada 18 January 2023 jam 10.12

Provinsi Jawa Tengah secara administratif terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan 576 kecamatan dan 8.562 kelurahan/desa.⁸⁰ Jawa Tengah mencakup 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari total luas Indonesia). Luas saat ini meliputi 1,00 juta hektar (30,80%) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20%) lahan non sawah.

Secara topografi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 4 unit topografis yaitu :

- a) Daerah puncak/ tebing
- b) Daerah lereng
- c) Daerah dataran
- d) Daerah lembah

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan terletak antara 6o50'-7o10' Lintang Selatan dan 109o35'-110o50' Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Kota Semarang meliputi 373,70 km² dan terdiri dari 16 kecamatan dan 117 pemukiman. Penduduk Semarang cukup beragam karena terdiri dari berbagai suku bangsa, antara lain Jawa, Tionghoa, Arab, dan lain-lain yang bertempat tinggal atau menetap di Semarang dengan berbagai alasan seperti bekerja, belajar, atau lainnya. Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki infrastruktur yang cukup lengkap seperti pelabuhan, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, dan kawasan perekonomian.

4.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks yang dihadapi oleh semua daerah terlebih pada negara berkembang. Dimana masalah yang saling berkaitan dan multidimensional dari berbagai faktor diantaranya tingkat pendapatan masyarakat, pendidikan, indeks pembangunan manusia, pengangguran, kesehatan , letak geografis dan lokasi lingkungan. Provinsi

⁸⁰ <https://jateng.bps.go.id/statictable/2022/09/13/2650/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-topografi-wilayah-2021.html> diakses pada 18 January 2023 jam 10.32

Jawa Tengah memiliki angka jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Banyaknya masyarakat yang buta huruf dan tidak memiliki keterampilan menjadikan mereka tidak produktif sehingga mereka tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan mengandalkan pekerjaan dari orang lain.

Saat ini, kemiskinan tidak hanya diakui sebagai hambatan finansial tetapi juga dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak-hak dasar dan perlakuan yang tidak setara bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Status sosial menjadikan kesenjangan antara si kaya dan si miskin terlihat sangat jelas. Oleh karena itu, pemerintah dengan dukungan masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab sangat besar untuk mengoptimalkan kebijakan guna mengentaskan atau mengurangi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.1
 Statistik Deskriptif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021

KEMISKINAN	
Mean	112.7010
Median	100.0800
Maximum	314.9500
Minimum	9.100000
Std. Dev.	63.70507
Skewness	0.767817
Kurtosis	3.905459
Jarque-Bera Probability	13.90387 0.000957
Sum	11833.60
Sum Sq. Dev.	422066.9
Observations	105

Sumber : *Output Eviews Diolah*, 2023

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas rata-rata jumlah penduduk miskin berdasarkan kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 sebesar 112,70 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi di

Kabupaten Brebes pada tahun 2021 sebesar 314,95 juta jiwa. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terendah sebesar 9,10 juta jiwa terjadi di Kota Magelang pada tahun 2019.

4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran dari pencapaian pembangunan manusia yang menggambarkan kemampuan dasar manusia guna memperluas pilihan-pilihan meliputi indeks harapan hidup, indeks standar hidup layak, dan indeks pendidikan. Indeks pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas produktivitas sumber daya manusia dengan harapan dapat menaikkan taraf hidup yang secara otomatis mengurangi kemiskinan.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021

IPM	
Mean	72.58343
Median	71.96000
Maximum	83.60000
Minimum	66.11000
Std. Dev.	4.386976
Skewness	0.946420
Kurtosis	3.367650
Jarque-Bera Probability	16.26628 0.000294
Sum	7621.260
Sum Sq. Dev.	2001.538
Observations	105

Sumber : *Output Eviews Diolah, 2023*

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas rata-rata indeks pembangunan manusia berdasarkan kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 sebesar 72,58 persen. Indeks pembangunan manusia tertinggi terjadi di Kota Salatiga pada tahun 2020 sebesar 83,60 persen. Sedangkan

kabupaten/kota dengan indeks pembangunan manusia terendah sebesar 66,11 persen terjadi di Kabupaten Brebes pada tahun 2020.

4.1.4 Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang sudah termasuk angkatan kerja aktif tetapi belum memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Menurut BPS tingkat pengangguran terbuka adalah banyaknya persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021

	TPT
Mean	5.557333
Median	5.260000
Maximum	9.970000
Minimum	2.430000
Std. Dev.	1.974026
Skewness	0.561285
Kurtosis	2.455062
Jarque-Bera Probability	6.812398 0.033167
Sum	583.5200
Sum Sq. Dev.	405.2649
Observations	105

Sumber : *Output Eviews Diolah*, 2023

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas rata-rata tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 sebesar 5,55 persen. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sebesar 9,97 persen. Sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran terbuka terendah sebesar 2,43 persen terjadi di Kabupaten Wngiri pada tahun 2021.

4.1.5 Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. PDRB adalah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh

kegiatan produksi. PDRB dapat dihitung dengan harga berlaku dan konstan, namun untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan tidak terpengaruh inflasi maka menggunakan PDRB atas dasar konstan.

Tabel 4.4
 Statistik Deskriptif Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di
 Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021

	PDRB
Mean	29682248
Median	20973089
Maximum	1.84E+08
Minimum	6312054.
Std. Dev.	29788111
Skewness	3.163171
Kurtosis	13.55387
Jarque-Bera Probability	662.4048 0.000000
Sum	3.12E+09
Sum Sq. Dev.	9.23E+16
Observations	105

Sumber : *Output Eviews Diolah*, 2023

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas rata-rata produk domestik regional bruto berdasarkan kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 sebesar Rp28.682.248 juta rupiah. Produk domestik regional bruto tertinggi terjadi di Kabupaten Demak pada tahun 2019 sebesar Rp1.844.170.009 juta rupiah. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terendah sebesar Rp6.312.054 juta rupiah terjadi di Kota Magelang pada tahun 2020.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Asumsi klasik merupakan kriteria yang harus terpenuhi dalam model regresi yang menggunakan metode estimasi ols agar menghasilkan hasil yang tidak bias, konsisten, dan efisien atau biasa disebut BLUE (Best Linear Unbiased estimator).

Tabel 4.5

Hasil Regresi Utama Pengaruh IPM, TPT dan PDRB Terhadap Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2019-2021 dengan model FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-768.3137	134.0322	-5.732305	0.0000
IPM	12.01968	1.854474	6.481451	0.0000
TPT	1.685600	0.373496	4.513037	0.0000
PDRB	-2.64E-08	2.86E-08	-0.922223	0.3597

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.997684	Mean dependent var	112.7010	
Adjusted R-squared	0.996405	S.D. dependent var	63.70507	
S.E. of regression	3.819577	Akaike info criterion	5.792698	
Sum squared resid	977.4744	Schwarz criterion	6.753179	
Log likelihood	-266.1167	Hannan-Quinn criter.	6.181904	
F-statistic	780.0852	Durbin-Watson stat	2.003843	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : *Output Eviews Diolah*, 2023

Namun karena ada perbedaan satuan hitung antar variabel maka model regresi yang digunakan merupakan hasil transformasi logaritma natural.

Tabel 4.6
Hasil Regresi Logaritma Natural Pengaruh IPM, TPT dan PDRB Terhadap Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2019-2021

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.291532	1.059492	-4.050555	0.0001
IPM	0.120387	0.013780	8.736141	0.0000
TPT	0.015996	0.002791	5.731286	0.0000
LNPDRB	-0.002051	0.015343	-0.133683	0.8941

Effects Specification

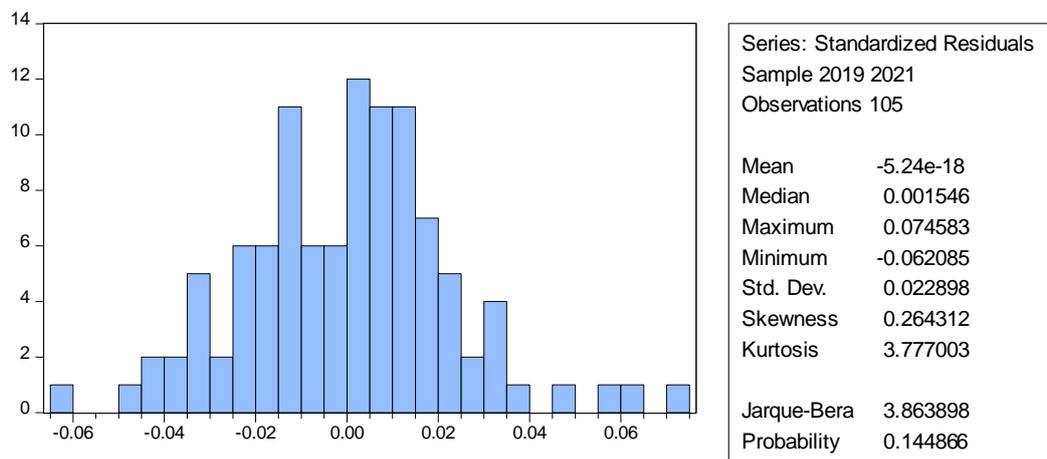
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999163	Mean dependent var	4.500691	
Adjusted R-squared	0.998701	S.D. dependent var	0.791425	
S.E. of regression	0.028528	Akaike info criterion	-4.001319	
Sum squared resid	0.054528	Schwarz criterion	-3.040838	
Log likelihood	248.0692	Hannan-Quinn criter.	-3.612113	
F-statistic	2161.447	Durbin-Watson stat	2.086493	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : *Output Eviews Diolah*, 2023

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residu pada model penelitian terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini untuk uji normalitas dilakukan dengan uji statistik *Jarque-Bera* dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai probabilitas *jarque-bera* lebih besar dari α sebesar 0,05 maka data disimpulkan berdistribusi normal dan begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.7
Uji Normalitas Pengaruh IPM, TPT, dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah tahun 2019-2021



Sumber : *Output Eviews Diolah*, 2023

Berdasarkan tabel uji normalitas tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $0,144866 >$ nilai tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha=0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model penelitian berdistribusi normal.

b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan linear antar variabel independen. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen. Apabila koefisiennya $< 8,0$ maka data tidak terjangkau multikolinearitas. Begitu juga sebaliknya, jika nilai koefisien

antarvariabel >8,0 maka data disimpulkan terjangkau multikolinearitas. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai koefisien antar variabel < 8,0 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi linear antar variabel independen.

Tabel 4.8
Koefisien Korelasi Antar Variabel IPM, TPT, dan PDRB terhadap Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2019-2021

	IPM	TPT	LNPDRB
IPM	1.000000	0.097119	0.130849
TPT	0.097119	1.000000	0.130339
LNPDRB	0.130849	0.130339	1.000000

4.2.2

Sumber : *Output Eviews Diolah, 2023*

c. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi ketika residual dalam model memiliki varians yang tidak konstan serta saling berhubungan antar residual observasi. Sehingga memberikan dampak serius bagi prediksi model penelitian. Dalam penelitian ini untuk melihat ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas dilakukan dengan uji glejser yang disajikan dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Glejser

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.339473	Prob. F(3,101)	0.0779
Obs*R-squared	6.822300	Prob. Chi-Square(3)	0.0778
Scaled explained SS	6.132379	Prob. Chi-Square(3)	0.1053

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 01/30/23 Time: 14:03

Sample: 1 105

Included observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.276395	0.626998	-2.035723	0.0444
IPM	0.007244	0.004978	1.455098	0.1487
TPT	0.005942	0.011062	0.537100	0.5924

LNPDRB	0.060731	0.033344	1.821336	0.0715
--------	----------	----------	----------	--------

Sumber : *Output Eviews Diolah*, 2023

Uji glejser sendiri hampir mirip dengan uji park, yang membedakan hanya pada variabel dependen yang diganti dengan nilai absolut residual. Berdasarkan hasil perhitungan uji glejser diatas nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0778 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dan nilai probabilitas masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model penelitian.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi atau hubungan antara residu pada periode waktu atau ruang dengan residu sebelumnya. Dalam penelitian menggunakan uji *Durbin Watson* untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai d_{hitung} dari hasil olah data eviws dengan nilai d_{tabel} . Dengan dasar pengambilan keputusan ialah jika nilai *Durbin Watson* berada diantara DU dan 4-DU artinya tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.10
Hasil uji *Durbin Watson*

C	-4.291532	1.059492	-4.050555	0.0001
IPM	0.120387	0.013780	8.736141	0.0000
TPT	0.015996	0.002791	5.731286	0.0000
LNPDRB	-0.002051	0.015343	-0.133683	0.8941
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999163	Mean dependent var	4.500691	
Adjusted R-squared	0.998701	S.D. dependent var	0.791425	
S.E. of regression	0.028528	Akaike info criterion	-4.001319	
Sum squared resid	0.054528	Schwarz criterion	-3.040838	
Log likelihood	248.0692	Hannan-Quinn criter.	-3.612113	
F-statistic	2161.447	Durbin-Watson stat	2.086493	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : *Output Eviews Diolah*, 2023

Pada model persamaan pengaruh IPM, TPT, dan PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 dengan jumlah observasi =105 dan k (variabel bebas) = 3 dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ maka diperoleh nilai dw sebesar 2,086493. Sedangkan berdasarkan tabel *Durbin Watson* diperoleh nilai du sebesar 1,7411 dan nilai dl sebesar 1.6237. sedangkan nilai 4-du adalah 2,2589. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak terjangkit autokorelasi karena nilai dw berada diantara du dan 4-du.

4.2.3 Analisis Data Fixed Effect Model

Estimasi panel data dengan model *Fixed Effect Model* dapat dilihat pada tabel 4.11. hasil regresi data panel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) menunjukkan bahwa variabel IPM (X1) dan TPT (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (Y). sedangkan variabel PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2019-2021. Nilai R-squared sebesar 0,9991 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mampu dijelaskan oleh variabel IPM (X1), TPT (X2) dan PDRB (X3) sebesar 99,91 persen. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Berikut disajikan hasil regresi IPM, TPT, dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 dengan model pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4.11
Regresi Pengaruh IPM, TPT, dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.291532	1.059492	-4.050555	0.0001
IPM	0.120387	0.013780	8.736141	0.0000
TPT	0.015996	0.002791	5.731286	0.0000
LNPDRB	-0.002051	0.015343	-0.133683	0.8941
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999163	Mean dependent var	4.500691	
Adjusted R-squared	0.998701	S.D. dependent var	0.791425	
S.E. of regression	0.028528	Akaike info criterion	-4.001319	

Sum squared resid	0.054528	Schwarz criterion	-3.040838
Log likelihood	248.0692	Hannan-Quinn criter.	-3.612113
F-statistic	2161.447	Durbin-Watson stat	2.086493
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : *Output Eviews Diolah, 2023*

4.3 Pengujian Statistik Analisis Regresi

4.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t-statistik menunjukkan pengaruh variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai t statistik dengan nilai kritis t tabel atau menghitung p value. Pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan produk domestik regional bruto terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha=0,05$) dan derajat kebebasan (df)=101 (n-k= 105-4), maka diperoleh nilai kritis t tabel sebesar 1,660.

Tabel 4.12

Nilai t-statistik dan koefisien IPM, TPT, dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah (2019-2021)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.291532	1.059492	-4.050555	0.0001
IPM	0.120387	0.013780	8.736141	0.0000
TPT	0.015996	0.002791	5.731286	0.0000
LNPDRB	-0.002051	0.015343	-0.133683	0.8941

Sumber : *Output Eviews Diolah, 2023*

Berdasarkan uji t-statistik bahwa variabel IPM dan TPT memiliki nilai t statistik sebesar 8,736 dan 5,731. Dan kedua variabel memiliki p value sebesar 0,0000 yang masing-masing lebih kecil dari α sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga variabel IPM dan TPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan nilai t statistik variabel PDRB sebesar -0,133 dengan nilai probabilitas sebesar 0,8941 > tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.

4.3.2 Uji simultan (Uji f)

Uji F menunjukkan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai f statistik dengan nilai kritis f tabel atau menghitung p value. Pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan produk domestik regional bruto terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha=0,05$) dengan derajat kebebasan pembilang(df_n)=3 (k-1) dan derajat kebebasan penyebut (df)=101 (n-k)= 105-4), maka diperoleh nilai kritis f tabel sebesar 2,694618. Berdasarkan regresi pengaruh IPM, TPT dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 di peroleh nilai f statistik sebesar 2161,447 (f_{hitung} > f_{tabel}) dan nilai p value sebesar $0,0000 < \alpha$ sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikatnya. Nilai koefisien berada ada rentang angka nol dan satu. Apabila nilai R² semakin mendekati angka satu berarti bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 0 maka secara keseluruhan variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependennya.

Berdasarkan hasil estimasi regresi pengaruh IPM, TPT dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,999163. Hal ini bahwa variabel independen dalam penelitian yaitu IPM, TPT dan PDRB mampu menjelaskan variabel dependen yaitu jumlah penduduk miskin sebesar 99,91 persen, sedangkan 0,09 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.3.4 Persamaan Regresi Linier Berganda

$$Y = -4,291532 + 0,120387 X_1 + 0,015996 X_2 - 0,002051 X_3$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa setiap IPM naik sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin juga naik sebesar 120 ribu jiwa. Setiap TPT naik sebesar

1 persen maka jumlah penduduk miskin naik sebesar 15 ribu jiwa. Dan setiap PDRB naik 1 juta maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 2 ribu jiwa.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

Kualitas sumber daya manusia menjadi awal dari pertumbuhan ekonomi. Dengan pemenuhan akses pelayanan sosial seperti pendidikan, gizi dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan atau softskill sumber daya manusia. Sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mampu berdaya saing dalam dunia pekerjaan, hal itu menjadi salah satu faktor dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini secara teori dan hipotesis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin adalah berpengaruh negatif akan tetapi berdasarkan uji statistik adalah berpengaruh positif signifikan. Dibuktikan dengan nilai koefisien yang bertanda positif (0,120387) dan nilai probabilitas sebesar (0,0000) > tingkat signifikansi 5 persen. Dengan kata lain Hipotesisi 1 ditolak.

Hipotesis 1 adalah:

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil regresi yang dilakukan dengan pendekatan *Fixed Effect Model* diperoleh nilai koefisien sebesar (0,120387) dan bertanda positif, yang menjelaskan bahwa hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin adalah berbanding lurus yang berarti bahwa setiap IPM naik sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin juga naik sebesar 120 ribu jiwa. Dengan probabilitas sebesar (0,0000) maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Evita dan Primandhana, 2022) dan (Dharmmayukti, Rotinsulu dan Niode, 2021) yang menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah dalam

rentang waktu 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan dalam komponen indeks pendidikan dan indeks harapan hidup namun tidak diikuti oleh peningkatan indeks standar hidup layak yang disebabkan oleh terjangkit wabah covid-19 yang membuat perekonomian menjadi lesu. Kesenjangan IPM antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga dapat menjadi penyebabnya.

Indeks Pembangunan Manusia memiliki 3 komponen utama yang menjadi penentu ukuran keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia disuatu wilayah yaitu Indeks Angka Harapan Hidup yang didefinisikan sebagai umur panjang dan hidup sehat masyarakat, Indeks pendidikan atau pengetahuan yang tercermin dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Serta Indeks standar Hidup Layak yang dapat dihitung dengan pengeluaran perkapita tahun tertentu. Pada tahun 2019 sampai 2021 perekonomian dunia tergonjang akibat adanya wabah covid-19 tak terkecuali Provinsi Jawa Tengah. Sampai pada akhir Januari 2021 penduduk yang terkonfirmasi positif covid-19 sebesar 123 ribu jiwa dengan jumlah kematian mencapai 4.945 jiwa, sehingga Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-3 dengan kasus covid-19 tertinggi setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Selain memberikan dampak buruk bagi kesehatan, wabah covid-19 juga memberikan dampak yang cukup parah di bidang sosial dan ekonomi. Covid-19 telah melumpuhkan sebagian besar kegiatan ekonomi yang mengakibatkan banyak penduduk kehilangan pekerjaan serta penurunan pendapatan.⁸¹

Meski begitu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ditengah terjangkit wabah covid-19 IPM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 masih mampu tumbuh sebesar 0,14 persen menjadi 71,87 dari tahun 2019 yang hanya sebesar 71,73 persen. Dan pada tahun 2021 IPM masih tumbuh positif sebesar 0,29 persen menjadi 72,16 yang masih berada ditaraf tinggi meskipun angka

⁸¹ Kementerian Keuangan and Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Kajian Fiskal Regional," 2021.

tersebut masih berada dibawah IPM nasional.⁸² Jika diperhatikan kenaikan angka IPM di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh positifnya indeks angka harapan hidup dan indeks pendidikan. Namun hal itu tidak diikuti oleh indeks standar hidup layak yang justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.⁸³ Sedangkan standar hidup layak mengalami penurunan karena pengeluaran perkapita Provinsi Jawa Tengah menurun dari tahun sebelum adanya wabah covid-19. Wabah ini menjadikan banyaknya angka pengangguran akibat kebijakan PSBB yang semakin ketat dari pemerintah dan menjadikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021. Hal itu yang menyebabkan variabel IPM berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

4.4.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

Tingginya tingkat pengangguran membawa dampak buruk terhadap perekonomian di suatu daerah. Pengangguran terjadi akibat banyak faktor mulai dari kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya motivasi untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri atau berwirausaha. Banyak dari mereka yang mengandalkan lapangan pekerjaan dari pemerintah atau pihak lain. Selain itu kurangnya keterampilan dari sumber daya manusia sendiri menjadi salah satu faktor terjadinya pengangguran. Dan jumlah penduduk yang semakin banyak setiap tahunnya menjadikan jumlah angkatan kerja bertambah pula dengan tanpa diimbangi penambahan lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah dengan dukungan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dengan cara mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

⁸² Musliman "IPM Jawa Tengah 2021 Bertengger di Angka 72,16"
<https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/12/09/ipm-jawa-tengah-2021-bertengger-di-angka-7216/> diakses ada 17 February 2023 pukul 14.25

⁸³ Nurul Kurniasih " Indeks pembangunan manusia Jateng melesat saat pandemi covid-19"
<https://jatengdaily.com/2020/indeks-pembangunan-manusia-jateng-melesat-saat-pandemi-covid-19/> diakses ada 17 februari 2023 pukul 14.10

Dalam penelitian ini tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dibuktikan dengan hasil uji statistik koefisien sebesar (0,015996) dan nilai probabilitas sebesar (0,0000). Dengan demikian hipotesis 2 diterima.

Hipotesis 2 adalah:

Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil regresi yang dilakukan dengan pendekatan *Fixed Effect Model* diperoleh nilai koefisien sebesar (0,015996) dan bertanda positif, yang menjelaskan bahwa hubungan antara tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin adalah berbanding lurus yang berarti bahwa Setiap TPT naik sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin naik sebesar 15 ribu jiwa. Begitu pula sebaliknya, jika TPT turun sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin juga turun sebesar 15 ribu jiwa. Serta nilai probabilitas sebesar (0,0000) maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yulia, 2022) dan (Ari Kristin , 2021) yang menjelaskan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan dalam rentang waktu 2019 sampai 2021 perekonomian sedang diambang resesi akibat pandemi covid-19 dengan digalakkannya kebijakan PSBB dari pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan pengurangan jam kerja dan tenaga kerja informal seperti pelaku UMKM, jasa transportasi serta bidang usaha lainnya. Jumlah angkatan kerja yang mengalami kenaikan setiap tahunnya namun tidak diikuti oleh adanya lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut tentunya akan menjadikan pendapatan perkapita menurun serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Sejak adanya wabah covid-19 yang masuk di Indonesia pada akhir tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 2,04 persen menjadi 6,48 persen pada tahun 2020 dari tahun 2019 yang hanya sebesar 4,44 persen. Kemudian pada tahun 2021 turun sebesar 0,53 persen menjadi 5,95. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Penganggur di Provinsi Jawa Tengah sempat mencapai 1,21 juta orang pada tahun 2020 yang kemudian turun menjadi 1,13 juta orang di tahun 2021. Hasil sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali menunjukkan jumlah penduduk Jawa Tengah yang berada dalam usia kerja semakin meningkat. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan orang di seluruh dunia mengalami masa-masa sulit di tahun 2019 sampai tahun 2021 salah satunya pekerja di dunia usaha. Penerapan kebijakan jarak fisik dan PSBB di berbagai daerah selama pandemi berdampak pada cara perusahaan beroperasi. Mulai dari pengurangan jam kerja, pengurangan kapasitas hingga pengurangan tenaga kerja yang menyebabkan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Hal tersebut membuat lebih dari 44 persen masyarakat Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pendapatan dengan semakin rendahnya pendapatan maka jumlah penduduk miskin semakin bertambah.⁸⁴ Hal ini didukung oleh penelitian (Sani, Fitri, Amri, Muliadi dan Ikhsan, 2022) yang menjelaskan bahwa covid-19 memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi pandemi covid-19 lebih berpengaruh meningkatkan kemiskinan di perkotaan dibandingkan di pedesaan.⁸⁵

4.4.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

PDRB memiliki peran yang cukup vital bagi masyarakat miskin, hal ini dikarenakan penyaluran yang tidak merata menjadikan tingkat kemiskinan

⁸⁴ Budi Aris "Tingkat pengangguran Terbuka di Jateng naik sejak pandemi"
<https://www.radioidola.com/2021/tingkat-pengangguran-terbuka-di-jateng-naik-sejak-pandemi/>
diakses pada 20 February 2023 Pukul 14.18

⁸⁵ Sri Rosmiati Sani et al., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel Di Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2022): 107, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.499>.

disetiap daerah sulit teratasi. PDRB menjadi salah satu faktor untuk melihat pertumbuhan ekonomi . PDRB adalah keseluruhan nilai tambah yang berasal dari kegiatan produksi pada periode waktu tertentu. Apabila pendapatan perkapita naik maka tingkat kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah akan naik sehingga perekonomian daerah bertambah. Dan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan tidak terpengaruh inflasi dapat menggunakan PDRB harga konstan.

Dalam penelitian ini produk domestik bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dibuktikan dengan hasil uji statistik koefisien sebesar (-0,002051) dan nilai probabilitas sebesar (0,8941). Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

Hipotesis 3 adalah:

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil regresi yang dilakukan dengan pendekatan *Fixed Effect Model* diperoleh nilai koefisien sebesar (-0,00251) dan bertanda negatif, yang menjelaskan bahwa hubungan antara PDRB terhadap jumlah penduduk miskin adalah berbanding balik yang berarti bahwa Setiap PDRB naik sebesar 1 juta maka jumlah penduduk miskin turun sebesar 2juta rupiah. Begitu pula sebaliknya, jika PDRB turun sebesar 1 juta maka jumlah penduduk miskin juga naik sebesar 2juta rupiah. Serta nilai probabilitas sebesar (0,8941) maka dapat disimpulkan bahwa produk domestik regional bruto memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.

Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Lestari,2017)⁸⁶ dan (Astuti, 2018)⁸⁷ yang menjelaskan bahwa produk

⁸⁶ Lestari, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015."

⁸⁷ Widia Astuti, "Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor)," *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)* 1, no. 3 (2018): 194–214, <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v1i3.1286>.

domestik bruto memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda seluruh negara dibelahan dunia termasuk Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 2019 sampai 2021.

Provinsi Jawa Tengah mengalami pergeseran struktur ekonomi yang memungkinkan adanya variasi antar kabupaten/kota baik mengenai variasi kebijakan, infrastruktur serta dukungan masyarakat akibat dampak covid-19. Selama pandemi covid-19 mobilitas masyarakat sangat dibatasi melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM) yang menjadikan sebagian sektor PDRB mengalami penurunan. Sektor yang cukup terdampak signifikan adalah sektor transportasi, industri, perhotelan, administrasi pemerintahan dan sektor jasa lainnya. Secara umum masih ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan positif selama pandemi covid-19 seperti sektor pertanian, kehutnan, perikanan, pengelolaan sampah dan yang lain. Meskipun demikian penurunan kontribusi sektoral pada sejumlah lapangan usaha di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah cukup berdampak negatif.

Tabel 4.13

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – Semester I 2022 (%)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sem I-2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,20	1,82	2,62	1,36	2,48	0,81	4,81
Pertambangan dan Penggalian	18,98	5,11	2,45	3,36	-0,80	4,4	-3,66
Industri Pengolahan	4,10	4,33	4,33	5,19	-3,74	2,32	4,41
Pengadaan Listrik dan Gas	4,57	5,22	5,36	5,48	1,79	5,95	9,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	6,51	4,88	4,42	2,29	5,87	1,60
Konstruksi	6,52	7,13	6,07	4,95	-3,76	7,37	-1,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,67	5,87	5,77	5,98	-3,80	5,8	3,56
Transportasi dan Pergudangan	4,91	6,30	7,55	8,49	-33,15	3,3	70,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,26	6,45	8,15	9,14	-7,98	5,92	13,97
Informasi dan Komunikasi	8,31	13,27	12,39	11,62	15,65	6,04	3,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,77	5,17	3,58	3,51	2,03	1,66	1,60
Real Estate	6,81	6,48	5,58	5,53	-0,28	2,15	5,28
Jasa Perusahaan	10,62	8,72	9,48	10,54	-7,19	3,07	4,58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	2,57	3,58	3,71	-1,31	-0,64	-2,91
Jasa Pendidikan	7,35	6,97	7,76	7,59	-0,24	0,07	2,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,86	8,60	8,80	6,72	8,19	0,18	3,65
Jasa lainnya	8,64	8,98	9,45	9,02	-8,01	0,53	16,48
PDRB	5,25	5,26	5,30	5,41	-2,65	3,32	5,39

Sumber: Pergub Jawa Tengah No.32 tahun 2022

Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, dan perdagangan besar dan eceran sangat mendominasi dalam kontribusi terhadap PDRB artinya industri menjadi salah satu sektor yang cukup berpengaruh. Seperti halnya penurunan kontribusi pada sektor industri sangat berdampak pada kabupaten/kota yang menjadi kawasan industri utama di Provinsi Jawa Tengah. Pandemi covid-19 mengakibatkan banyak industri mengalami kondisi keuangan yang cukup parah sehingga sebagian tenaga kerja di PHK. Hal itu yang menyebabkan PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan⁸⁸. Jika nilai PDRB meningkat maka kemiskinan akan menurun. Sebaliknya, jika PDRB menurun

⁸⁸ Andri Kurniawan and Hanifah Makarim, "JURNAL GEOGRAFI Perbedaan Pergeseran Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Menurut Kabupaten / Kota Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Provinsi Jawa Tengah" 19, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.15294/jg.v19i1.32019>.

maka jumlah penduduk miskin akan bertambah meskipun tidak signifikan karena tidak semua sektor PDRB mengalami penurunan seperti pada sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan justru mengalami peningkatan yang signifikan akibat adanya wabah covid-19 sehingga masih terdapat lapangan pekerjaan pada beberapa sektor yang tidak terdampak.

4.4.4 Kemiskinan Perspektif Islam

Dalam menanggapi masalah kemiskinan umat Islam, setidaknya empat kelompok besar muncul: tradisional, modernis, revivalis, dan transformatif⁸⁹. Diantara keempat kelompok yang menanggapi persoalan kemiskinan, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan dari dua kelompok besar yaitu kelompok tradisional dan modernis sebagai berikut :

Kelompok yang dikenal sebagai tradisional berpendapat bahwa kemiskinan umat Islam adalah akibat dari takdir Allah. Kelompok tradisional ini tampaknya mengamalkan teologi jabariyah, atau teologi Ash'ari yang salah paham, yang mengacu pada sifat berserah yang berlebihan kepada Allah SWT. Akibat dari sifat berserah yang berlebihan, tidak banyak usaha yang dilakukan dapat mengubah nasib seseorang. Menurut penelitian, teologi Ash'ari adalah teologi yang mengajarkan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita, dan disebutkan bahwa manusia memiliki kesempatan untuk mengubah Nasib dengan konsep *kasab* namun tetap mengakui kekuasaan Allah swt. Berdasarkan konsep Ash'ari, *tawakal* atau sifat berserah itu akan muncul setelah melakukan usaha yang maksimal. Konsep ini dapat dijadikan manivestasi perpaduan antara QS. Al-A'rad ayat 11 bahwa manusia sendiri yang dapat mengubah nasibnya sendiri:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ
مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya

⁸⁹ Khoiruddin Nasution, "Wilayah Kajian Dan Filsafat Ekonomi Islam," *Millah* II, no. 2 (2002): 09–25, <http://jurnal.uui.ac.id/Millah/article/view/6021/5437>.

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'd : 11)⁹⁰

Dengan QS. Ali Imron ayat 159 bahwa apabila sudah berusaha maksimal maka serahkanlah hasil akhirnya kepada Allah swt. :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.⁹¹

Kelompok Modernis berpendapat bahwa teologi atau mentalitas Islam adalah penyebab kemiskinan umat Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gerakan modernis adalah tanggapan terhadap kelompok tradisional. Kelompok modernis berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk merubahnya adalah dengan mengubah pikirannya (teologi). Misalnya, gerakan ini dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah, juga dikenal sebagai gerakan Muhammad 'Abduh di Mesir dan Attatuk di Turki. Di Indonesia, cara kerja kelompok modernis ini sedikit berubah dengan mengubah kebiasaan bid'ah, khurafat, dan lainnya. Ini mungkin termasuk upaya untuk mengurangi

⁹⁰ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6510153/surat-ar-rad-ayat-11-jelaskan-nasib-suatu-kaum-ditentukan-oleh-mereka-sendiri> diakses tanggal 12 June 2023 jam 21.55.

⁹¹ <https://iqra.republika.co.id/alquran/ayat/3/452/ali-imran-Ayat-159#:~:text=159.,dengan%20mereka%20dalam%20urusan%20itu>. Diakses tanggal 12 June 2023 jam 22.04

frekuensi acara ritual dan meningkatkan usaha nyata. Karena, menurut kelompok ini, kebiasaan seperti ini yang menyebabkan umat Islam menjadi miskin⁹².

Islam memberikan solusi dalam menanggulangi kemiskinan dengan instrument zakat infaq sedekah dan wakaf (ZISWAF). ZISWAF, khususnya zakat muncul sebagai instrumen penyelesaian dan berkelanjutan di tengah masalah ekonomi saat ini diantaranya sebagai berikut⁹³:

- a) Syariat telah menetapkan cara zakat digunakan (QS. AtTaubah: 60) dan hanya diberikan kepada delapan golongan (ashnaf): fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Sebagian besar ulama setuju bahwa tidak halal menerima zakat selain delapan kategori ini. Dan tidak ada pihak yang berhak untuk mengubah atau mengganti ketentuan ini. Zakat secara alami bersifat pro-miskin karena karakteristik ini. Karena itu, zakat akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan karena dana akan dialokasikan dengan lebih tepat sasaran.
- b) Zakat memiliki prosentase yang rendah dan tetap dan tidak pernah berubah karena telah diatur dalam syarat. Sebagai contoh, zakat yang diterapkan pada basis yang luas, seperti zakat perdagangan, memiliki prosentase hanya 2,5%. Tidak ada yang dapat mengubah atau mengganti ketentuan ini. Karena itu, zakat tidak akan mengganggu insentif investasi, membuat kebijakan publik lebih transparan, dan memberikan kepastian usaha.
- c) Zakat memiliki prosentase yang berbeda, dan memberikan keringanan kepada bisnis yang menghadapi masalah produksi yang lebih besar. Sebagai contoh, zakat untuk produk pertanian

⁹² Nasution, "Wilayah Kajian Dan Filsafat Ekonomi Islam."

⁹³ Didin Hafidhuddin, "ISLAM DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Didin Hafidhuddin," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 3, no. 1 (2012): 25–32, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/view/347%0Ahttps://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/download/347/245>.

yang berasal dari lahan irigasi besar adalah 5%, dan zakat untuk produk pertanian yang berasal dari lahan tadah hujan besar adalah 10%. Karakteristik ini membuat zakat ramah pasar dan tidak akan memengaruhi iklim bisnis.

- d) Zakat berlaku secara luas dan mencakup berbagai aktivitas ekonomi. Zakat diambil dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas bisnis, dan barang tambang. Menurut fiqh modern, zakat juga dapat diberikan dari seluruh pendapatan yang diperoleh dari aset atau keahlian pekerja, serta dari perusahaan. Zakat memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini menjadi sumber penting untuk pembiayaan inisiatif pengentasan kemiskinan seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 267 dan QS. Adz-Dzariyat ayat 19.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada penelitian diatas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah secara parsial dengan alat analisis *Fixed Effect Model* pada program *Eview10* menghasilkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai koefisien yang bertanda positif (0,120387) dan nilai probabilitas sebesar (0,0000). Hal ini dikarenakan peningkatan IPM hanya terjadi pada indeks angka harapan hidup dan pendidikan tanpa diikuti oleh peningkatan indeks standar hidup layak.
2. Tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah secara parsial dengan alat analisis *Fixed Effect Model* pada program *Eview10* menghasilkan bahwa TPT memiliki pengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai koefisien yang bertanda positif (0,015996) dan nilai probabilitas sebesar (0,0000). Hal ini dikarenakan resesi akibat terjangkit wabah covid-19 yang menyebabkan pemerintah menggalakkan aturan PPKM dan PSBB sehingga terjadinya pengurangan jam kerja maupun tenaga kerja.
3. Produk domestik regional bruto terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah secara parsial dengan alat analisis *Fixed Effect Model* pada program *Eview10* menghasilkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai koefisien yang bertanda negatif (-0,00251) dan nilai probabilitas sebesar (0,8941). Hal ini dikarenakan meskipun sebagian sektor terdampak akibat covid-19 namun masih terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan positif seperti sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan lainnya sehingga masih terdapat lapangan pekerjaan pada beberapa sektor yang tidak terdampak.
4. Kelompok yang dikenal sebagai tradisional berpendapat bahwa kemiskinan umat Islam adalah akibat dari takdir Allah. Sedangkan Kelompok Modernis

berpendapat bahwa teologi atau mentalitas Islam adalah penyebab kemiskinan umat Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran terhadap penemuan ini sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mampu memberikan kebijakan yang mendorong peningkatkan indeks standar hidup layak dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah memberikan prioritas terhadap kawasan industri utama dengan membuka investasi asing untuk menanamkan saham di kabupaten/kota yang memiliki kawasan industri utama guna mengurangi jumlah pengangguran yang terjadi akibat PHK pada masa covid-19.
3. Pengelolaan pada sektor PDRB yang terdampak wabah covid-19 serta memiliki kontribusi tinggi diutamakan serta pendistribusian pendapatan daerah harus dilakukan secara merata sehingga seluruh lapisan masyarakat baik di desa maupun di kota dapat merasakan pembangunan ekonomi.
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variable bebas dengan variable moderasi misalnya zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Ardi, Taufik Hidayat, Hendratno Tuhiman, Sandra Kurniawati, and Achmad Maulana. "Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoretis Dan Usulan Perbaikan." *Tnp2K*, 2020, 1–36.
- Andhykha, Ridho, Herniwati Retno Handayani, and Nenek Woyanti. "Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah." *Media Ekonomi Dan Manajemen* 33, no. 2 (2018): 113–23. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>.
- Aprianto, Kiky, and Naerul Edwin. "Kemiskinan Dalam ..." 8, no. 2 (2017): 169–88.
- Astuti, Widia. "Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor)." *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)* 1, no. 3 (2018): 194–214. <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v1i3.1286>.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. "Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 87–104. <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>.
- Cantika, Sri Budi. "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam." *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2014): 101. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>.
- Cholili, Fatkhul Mufid. "Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Ekonomi.*" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 5 (2014): 557–77.
- Dio Syahrullah. "Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012," 2014.
- Doni, A H, F Alfiona, W Andespa, and ... "Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi

- Islam Dan Kovenisional.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 2022, 1–10.
<https://jiemas.stai-dq.org/index.php/home/article/view/20%0Ahttps://jiemas.stai-dq.org/index.php/home/article/download/20/23>.
- Ekonomi, Fakultas, D A N Bisnis, and U I N Walisongo Semarang. “FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM,” 2018.
- Hafidhuddin, Didin. “ISLAM DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Didin Hafidhuddin.” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 3, no. 1 (2012): 25–32.
<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/view/347%0Ahttps://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/download/347/245>.
- Iqbal, Muhammad. “Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah*, 2017, 10.
- “ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX DI KAWASAN EKSPLORASI TAMBANG BATU BARA DI BATU SOPANG KALIMANTAN TIMUR Islamic Human Development Index In The Expploration Of Mine Coal Mining In Batu Sopang East Kalimantan Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyar,” 2018.
- Keuangan, Kementerian, and Direktorat Jenderal Perbendaharaan. “Kajian Fiskal Regional,” 2021.
- Kurniawan, Andri, and Hanifah Makarim. “JURNAL GEOGRAFI Perbedaan Pergeseran Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Menurut Kabupaten / Kota Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Provinsi Jawa Tengah” 19, no. 1 (2022): 1–9.
<https://doi.org/10.15294/jg.v19i1.32019>.
- Lestari, Riana Puji. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 53, no. 9 (2017): 1689–99.

- Maulana, Rivo, Agus Joko Pitoyo, and Muhammad Arif Fahrudin Alfana. "Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017." *Media Komunikasi Geografi* 23, no. 1 (2022): 12–24. <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.39301>.
- Nasution, Khoiruddin. "Wilayah Kajian Dan Filsafat Ekonomi Islam." *Millah* II, no. 2 (2002): 09–25. <http://jurnal.uui.ac.id/Millah/article/view/6021/5437>.
- Novianto, Setyo. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>.
- Nurmainah, Santi. "Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manuisis Terhadap Pertumbuhan." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20, no. 2 (2013): 131–41. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/3158/847>.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>.
- Raziqiin, Khairur dan Telisa Aulia Falian, and Telisa Aulia Falian. "Analisis Dampak Kepemilikan Surat Berharga Oleh Bpd Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah." *Majalah Ilmiah Bijak* 14, no. 1 (2018): 32–47. <https://doi.org/10.31334/bijak.v14i1.58>.
- Rossalia, Izza. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran Dan Zakat Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2012-2017." *Skripsi*, 2019. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5766/>.
- Sani, Sri Rosmiati, Cut Dian Fitri, Khairul Amri, Muliadi Muliadi, and Ikhsan Ikhsan. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel Di Indonesia." *Ekonomis: Journal of*

Economics and Business 6, no. 1 (2022): 107.

<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.499>.

Segoro, Waseso, and Muhamad Akbar Pou. “Analisis Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto (Pdrb), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2012.” *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora* 6 (2016): 28–34.

<http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/40>.

Simatupang, Pantjar, and Saktyanu K. Dermoredjo. “Produksi Domestik Bruto, Harga Dan Kemiskinan: Hipotesis ‘Trickle Down’ Dikaji Ulang.” *Ekonomi Dan Keuangan Indonesia* 51, no. 3 (2003): 291–324.

Sukmaraga, Prima. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah.” *Harvard Business Review* 85, no. 3 (2011): 21–22.

Taufiq, Muhammad. “Analisis Efektifitas Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari Ekonomi Islam.” *Universitas Islam Indonesia*, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/19923>.

Yacoub, Yarlina. “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat” 8 (2012): 176–85.

Yamali, Fakhrol Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2020): 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>.

LAMPIRAN

Data Penelitian

		penduduk_miskin	ipm	tpt	pdrb
2019	kab.cilacap	185.20	69.98	7.24	100327298.90
2020	kab.cilacap	198.20	69.95	9.10	90011584.10
2021	kab.cilacap	201.71	70.42	9.97	91944587.54
2019	kab.banyumas	211.60	71.96	4.17	39779320.86
2020	kab.banyumas	225.84	71.98	6.00	39121623.57
2021	kab.banyumas	232.91	72.44	6.05	40686808.02
2019	kab.purbalingga	140.10	68.99	4.73	17387610.58
2020	kab.purbalingga	149.48	68.97	6.10	17182873.71
2021	kab.purbalingga	153.08	69.15	6.05	17731438.00
2019	kab.banjarnegara	136.10	67.34	4.44	15246865.65
2020	kab.banjarnegara	144.95	67.45	5.86	15045884.99
2021	kab.banjarnegara	150.19	67.86	5.86	15536477.91
2019	kab.kebumen	201.30	69.60	4.69	19815062.62
2020	kab.kebumen	211.09	69.81	6.07	19527664.95
2021	kab.kebumen	212.92	70.05	6.03	20253059.43
2019	kab.purworejo	82.20	72.50	2.91	13353336.05
2020	kab.purworejo	84.79	72.68	4.04	13138294.11
2021	kab.purworejo	88.80	72.98	3.59	13582556.43
2019	kab.wonosobo	131.30	68.27	3.43	13793040.27
2020	kab.wonosobo	137.63	68.22	5.37	13566176.25
2021	kab.wonosobo	139.67	68.43	5.26	14064764.70
2019	kab.magelang	137.40	69.87	3.07	23253154.32
2020	kab.magelang	146.34	69.87	4.27	22865151.84
2021	kab.magelang	154.91	70.12	5.03	23661713.24
2019	kab.boyolali	93.70	73.80	3.09	22681097.81
2020	kab.boyolali	100.59	74.25	5.28	22409732.64
2021	kab.boyolali	104.82	74.40	5.09	23447366.01
2019	kab.klaten	144.10	75.29	3.54	27805993.69
2020	kab.klaten	151.83	75.56	5.46	27480359.39
2021	kab.klaten	158.23	76.12	5.48	28531108.64
2019	kab.sukoharjo	63.66	76.84	3.39	27076442.63
2020	kab.sukoharjo	68.89	76.98	6.93	26616503.11
2021	kab.sukoharjo	73.84	77.13	3.32	27634117.53
2019	kab.wonogiri	98.30	69.98	2.55	20856209.49
2020	kab.wonogiri	104.37	70.25	4.27	20563144.42
2021	kab.wonogiri	110.46	70.49	2.43	21251003.92

2019	Kabupaten Karanganyar	84.50	75.89	3.12	26599744.09
2020	Kabupaten Karanganyar	91.72	75.86	5.96	26103228.36
2021	Kabupaten Karanganyar	95.41	75.99	5.89	27034107.96
2019	Kabupaten Sragen	113.80	73.43	3.32	26853059.12
2020	Kabupaten Sragen	119.38	73.95	4.75	26367261.24
2021	Kabupaten Sragen	122.91	74.08	4.76	27355145.96
2019	Kabupaten Grobogan	161.90	69.86	3.54	19692631.32
2020	Kabupaten Grobogan	172.26	69.87	4.50	19692631.40
2021	Kabupaten Grobogan	175.72	70.41	4.38	20115533.52
2019	Kabupaten Blora	97.90	68.65	3.82	18318415.14
2020	Kabupaten Blora	103.73	68.84	4.89	17483886.74
2021	Kabupaten Blora	107.05	69.37	3.81	18126446.90
2019	Kabupaten Rembang	95.30	70.15	3.60	13612335.31
2020	Kabupaten Rembang	100.08	70.02	4.83	13409631.20
2021	Kabupaten Rembang	101.40	70.43	3.67	13925516.25
2019	Kabupaten Pati	119.00	71.35	3.64	30885378.59
2020	Kabupaten Pati	127.37	71.77	4.74	30527473.16
2021	Kabupaten Pati	128.74	72.28	4.60	31559078.68
2019	Kabupaten Kudus	58.00	74.94	3.80	73241777.45
2020	Kabupaten Kudus	64.24	75.00	5.53	70961748.50
2021	Kabupaten Kudus	67.06	75.16	3.77	69556927.81
2019	Kabupaten Jepara	83.50	71.88	2.92	21384282.93
2020	Kabupaten Jepara	91.14	71.99	6.70	20973089.31
2021	Kabupaten Jepara	95.22	72.36	4.23	21944232.37
2019	Kabupaten Demak	137.60	71.87	5.42	184417009.99
2020	Kabupaten Demak	146.87	72.22	7.31	18374561.64
2021	Kabupaten Demak	151.74	72.57	5.28	18856415.63
2019	Kabupaten Semarang	73.90	74.14	2.54	35638961.98
2020	Kabupaten Semarang	79.88	74.10	4.57	34688037.34
2021	Kabupaten Semarang	83.61	74.24	5.02	35946100.10
2019	Kabupaten Temanggung	72.60	69.56	2.98	15214058.87
2020	Kabupaten Temanggung	77.33	69.57	3.85	14890755.46
2021	Kabupaten Temanggung	79.09	69.88	2.62	15387930.43
2019	Kabupaten Kendal	91.20	71.97	6.26	30916386.47

2020	Kabupaten Kendal	97.49	72.29	7.56	30449024.40
2021	Kabupaten Kendal	100.00	72.50	7.55	31632276.02
2019	Kabupaten Batang	64.10	68.42	4.11	15226786.53
2020	Kabupaten Batang	70.57	68.65	6.92	15031083.84
2021	Kabupaten Batang	74.91	68.92	6.59	15764265.54
2019	Kabupaten Pekalongan	87.00	69.71	4.35	16356350.99
2020	Kabupaten Pekalongan	91.86	69.63	6.97	16047511.77
2021	Kabupaten Pekalongan	95.26	70.11	4.28	16615065.66
2019	Kabupaten Pemalang	200.70	66.32	6.45	18267199.78
2020	Kabupaten Pemalang	209.03	66.32	7.64	18155597.42
2021	Kabupaten Pemalang	215.08	66.56	6.71	18916261.68
2019	Kabupaten Tegal	109.90	68.24	8.12	24861495.83
2020	Kabupaten Tegal	117.50	68.39	9.82	24492665.57
2021	Kabupaten Tegal	123.52	68.79	9.97	25402911.06
2019	Kabupaten Brebes	293.20	66.12	7.39	32847862.67
2020	Kabupaten Brebes	308.78	66.11	9.83	32693080.65
2021	Kabupaten Brebes	314.95	66.32	9.78	33456328.43
2019	Kota Magelang	9.10	78.80	4.37	6470539.51
2020	Kota Magelang	9.27	78.99	8.59	6312054.41
2021	Kota Magelang	9.44	79.43	8.73	6513894.68
2019	Kota Surakarta	45.20	81.86	4.16	35441107.67
2020	Kota Surakarta	47.03	82.21	7.92	34815965.32
2021	Kota Surakarta	48.78	82.62	7.85	36211248.26
2019	Kota Salatiga	9.20	83.12	4.33	9666446.31
2020	Kota Salatiga	9.69	83.14	7.44	9503711.49
2021	Kota Salatiga	10.14	83.60	7.26	9820286.85
2019	Kota Semarang	72.00	83.19	4.50	140199517.36
2020	Kota Semarang	79.58	83.05	9.57	137609712.18
2021	Kota Semarang	84.40	83.55	9.54	144710662.93
2019	Kota Pekalongan	20.20	74.77	5.80	7477425.04
2020	Kota Pekalongan	22.16	74.98	7.02	7337833.89
2021	Kota Pekalongan	23.49	75.40	6.89	7601486.23
2019	Kota Tegal	18.60	74.93	8.08	11205782.88
2020	Kota Tegal	19.55	75.07	8.40	10949122.06
2021	Kota Tegal	20.27	75.52	8.25	11290268.87

Uji CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.910743	1.112733	2.615851	0.0103
IPM	-0.133554	0.008835	-15.11704	0.0000
TPT	-0.035515	0.019632	-1.808990	0.0734
LNPDRB	0.677684	0.059176	11.45195	0.0000

R-squared	0.763507	Mean dependent var	4.500691
Adjusted R-squared	0.756482	S.D. dependent var	0.791425
S.E. of regression	0.390549	Akaike info criterion	0.994823
Sum squared resid	15.40536	Schwarz criterion	1.095926
Log likelihood	-48.22819	Hannan-Quinn criter.	1.035792
F-statistic	108.6911	Durbin-Watson stat	0.396291
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.291532	1.059492	-4.050555	0.0001
IPM	0.120387	0.013780	8.736141	0.0000
TPT	0.015996	0.002791	5.731286	0.0000
LNPDRB	-0.002051	0.015343	-0.133683	0.8941

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999163	Mean dependent var	4.500691
Adjusted R-squared	0.998701	S.D. dependent var	0.791425
S.E. of regression	0.028528	Akaike info criterion	-4.001319
Sum squared resid	0.054528	Schwarz criterion	-3.040838
Log likelihood	248.0692	Hannan-Quinn criter.	-3.612113
F-statistic	2161.447	Durbin-Watson stat	2.086493
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.390030	0.770795	5.695455	0.0000
IPM	0.000645	0.009778	0.065977	0.9475
TPT	0.024247	0.002702	8.974085	0.0000

LNPDRB	-0.004186	0.015074	-0.277690	0.7818
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.357668	0.9937
Idiosyncratic random			0.028528	0.0063
Weighted Statistics				
R-squared	0.217377	Mean dependent var		0.207038
Adjusted R-squared	0.194131	S.D. dependent var		0.056235
S.E. of regression	0.050482	Sum squared resid		0.257393
F-statistic	9.351077	Durbin-Watson stat		0.876483
Prob(F-statistic)	0.000016			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.022193	Mean dependent var		4.500691
Sum squared resid	66.58644	Durbin-Watson stat		0.003388

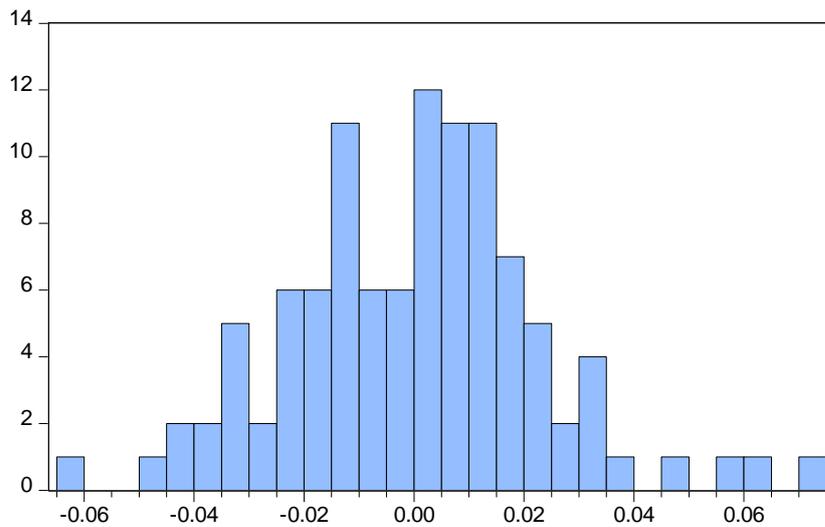
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	412.924747	(34,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	561.717890	34	0.0000

Uji Hausmant

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	218.267537	3	0.0000

Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals	
Sample 2019 2021	
Observations 105	
Mean	-5.24e-18
Median	0.001546
Maximum	0.074583
Minimum	-0.062085
Std. Dev.	0.022898
Skewness	0.264312
Kurtosis	3.777003
Jarque-Bera	3.863898
Probability	0.144866

Uji Multikolinearitas

	IPM	TPT	LNPDRB
IPM	1.000000	0.097119	0.130849
TPT	0.097119	1.000000	0.130339
LNPDRB	0.130849	0.130339	1.000000

Uji Heterokedastisitas

F-statistic	2.339473	Prob. F(3,101)	0.0779
Obs*R-squared	6.822300	Prob. Chi-Square(3)	0.0778
Scaled explained SS	6.132379	Prob. Chi-Square(3)	0.1053

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 01/30/23 Time: 14:03

Sample: 1 105

Included observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.276395	0.626998	-2.035723	0.0444
IPM	0.007244	0.004978	1.455098	0.1487
TPT	0.005942	0.011062	0.537100	0.5924
LNPDRB	0.060731	0.033344	1.821336	0.0715

R-squared	0.064974	Mean dependent var	0.311283
Adjusted R-squared	0.037201	S.D. dependent var	0.224276

S.E. of regression	0.220065	Akaike info criterion	-0.152438
Sum squared resid	4.891283	Schwarz criterion	-0.051335
Log likelihood	12.00301	Hannan-Quinn criter.	-0.111469
F-statistic	2.339473	Durbin-Watson stat	1.177081
Prob(F-statistic)	0.077911		

Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.291532	1.059492	-4.050555	0.0001
IPM	0.120387	0.013780	8.736141	0.0000
TPT	0.015996	0.002791	5.731286	0.0000
LNPDRB	-0.002051	0.015343	-0.133683	0.8941

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999163	Mean dependent var	4.500691
Adjusted R-squared	0.998701	S.D. dependent var	0.791425
S.E. of regression	0.028528	Akaike info criterion	-4.001319
Sum squared resid	0.054528	Schwarz criterion	-3.040838
Log likelihood	248.0692	Hannan-Quinn criter.	-3.612113
F-statistic	2161.447	Durbin-Watson stat	2.086493
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel Durbin Watson

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538	1.5542	1.7776
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546	1.5572	1.7781
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553	1.5600	1.7785
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560	1.5628	1.7790
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567	1.5656	1.7795
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575	1.5683	1.7799
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7582	1.5710	1.7804
101	1.6558	1.6958	1.6357	1.7163	1.6153	1.7374	1.5946	1.7589	1.5736	1.7809
102	1.6576	1.6971	1.6376	1.7175	1.6174	1.7383	1.5969	1.7596	1.5762	1.7813
103	1.6593	1.6985	1.6396	1.7186	1.6196	1.7392	1.5993	1.7603	1.5788	1.7818
104	1.6610	1.6998	1.6415	1.7198	1.6217	1.7402	1.6016	1.7610	1.5813	1.7823
105	1.6627	1.7011	1.6433	1.7209	1.6237	1.7411	1.6038	1.7617	1.5837	1.7827
106	1.6644	1.7024	1.6452	1.7220	1.6258	1.7420	1.6061	1.7624	1.5861	1.7832

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Kiki Dwi Rahmawati
Nim : 1905026040
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 16 Februari 2002
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Podorejo RT.02 RW.06 Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Email : Kikidr2208@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Podorejo 3
2. SMP Hasanuddin 7 Semarang
3. SMK Miftahul Huda Peron Limbangan Kendal
4. UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN

1. Magang di BMT NU Sejahtera Cab. Sumowono
2. Magang di Dinas Perdagangan Kota Semarang

ORGANISASI

1. OSIS SMP Hasanuddin 7 Semarang
2. PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo Semarang
3. IPPNU Ranting Podorejo Kec. Ngaliyan